



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	Ke – 19
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri PPN / Kepala Bappenas
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 19 Juni 2023
Waktu	:	11.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	:	Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes (Wk. Ketua Komisi XI/ F – PPP)
Sekretaris Rapat	:	Dr. Anita Handyaniputri, S.T., M.T. (Kabag Sekretariat Komisi XI)
Acara	:	Pembahasan RKP dan RKA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024
Hadir	:	A. Anggota DPR RI : 24 dari 54 orang Anggota Komisi XI DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

2 orang dari 5 orang Pimpinan:

1. Dolfie O. F. P. (Wk Ketua/F – PDIP)
2. Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes. (Wk. Ketua/F – PPP)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

7 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
2. Ir. Eriko Sotadurga B. P. S.
3. Masinton Pasaribu, S.H.
4. Dr. H. Musthofa, S.E., M.M.
5. Indah Kurnia
6. Dr. Sihar P. H. Sitorus, BSBA, M.BA
7. Marinus Gea, S.E., M.Ak.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Puteri Anetta Komaudin, B.Com.
2. Dr. Tr. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.
3. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Heri Gunawan, S.E.
2. H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., AK., M.M., CA.
3. Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si.
4. DR. H. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Fauzi Amro, M.Si.
2. Satori, S.Pdl., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

--

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Hj. Siti Mufattahah, P.Si., M.B.A.
2. Harmusa Oktaviani

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M.
2. H. Hidayatullah, S.E.
3. H. Ecky Awal Mucharam

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

--

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.

B. Undangan

Menteri PPN RI / Kepala Bappenas (DR. (HC) H. Suharso Monoarfa) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PPP (Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes.):

Bisa Pak Menteri? Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta seluruh jajaran, dan
Hadirin yang berbahagia.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi XI DPR RI, rapat kerja hari ini bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas sudah dihadiri oleh 15 anggota dari 5 fraksi, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 279 dan 281 Peraturan DPR RI tentang Tatib telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucapkan syukur *alhamdulillahirabbil'alamin*, izinkan kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada pagi hari ini dan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. *Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)

Mengawali rapat kerja hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kurnia-Nya pada kita semua, sehingga dapat melakukan atau menghadiri raker kita pada hari ini. Agenda rapat kerja hari ini adalah Pengantar RKP dan RKA Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024.

Hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui, RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga. Rencana kerja dan anggaran disusun untuk mewujudkan sinergitas pada tataran pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan, sehingga RKA harus terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran.

Pada KEM-PPKF tahun 2024 disampaikan bahwa Pagu Indikatif RKA PPN/Bappenas dialokasikan sebesar Rp2.102.745.225.000,00 dengan rincian sebagai berikut: dukungan manajemen Rp614.836.490.000,00; kemudian perencanaan pembangunan nasional Rp1.487.908.735.000,00. Sehingga total Rp2.102.745.225.000,00.

Melalui raker hari ini kami ingin mendengarkan pengantar RKA dan RKP dari Kementerian PPN/Bappenas dan saya kira untuk memanfaatkan waktu secara maksimal, kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya.*

Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas rapat kerja pada hari ini dan kami akan mengulangi lagi sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Komisi XI pada pertemuan sebelumnya.

Pertama, kami akan tampilkan struktur organisasi Bappenas halaman 4 yang terdiri dari ada 9 deputi, kemudian ada 5 staf ahli, ada 1 inspektorat, dan 1 sekretariat atau sekretaris utama. *Next*, kemudian komposisinya ada 2.799 orang yang bekerja di Bappenas, tetapi yang ASN hanya 826 orang ya. Kemudian 1.973 adalah yang PPMPN. Sebagian besar perempuan 58% dan pendidikan S3-nya ada 7%, kemudian masih ada yang berpendidikan SMP, SMA dan sebagian besar adalah S1 dan S2. *Baby boomer*-nya tinggal 13% yang sebentar lagi juga pensiun, sudah paling banyak adalah generasi millennial dan generasi X.

Tugas dan fungsi. Yang pertama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan tugas pemerintah di bidang perencanaan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi-fungsinya adalah penyusunan kebijakan perencanaan, koordinasi *clearing house* perencanaan, koordinasi satu data, penyusunan APBN dan RAPBN bersama Kemenkeu, penyusunan prakarsa strategis, koordinasi percepatan pembangunan; *monitoring* evaluasi dan pengendalian, pencarian sumber pendanaan APBN dan non-APBN; dukungan manajerial internal dan pengelolaan barang milik negara serta pengawasan internal.

Siklus tata kelola pembangunan tahunan adalah tentu dimulai dari perencanaan pembangunan nasional, kemudian penganggaran, kemudian *monitoring* dan evaluasi dan pengendalian, dan di dalam perencanaan pembangunan ada enabler dalam bentuk prakarsa strategis.

Mekanisme penyusunan rencana dan pengendalian. Masing-masing ini ada Deputi Pemantauan dan Evaluasi. Deputi bidang Ekonomi untuk asumsi

makro ekonomi, proyeksi pertumbuhan, proyeksi kebutuhan anggaran, kerangka ekonomi makro dan sosial, fokus prioritas pembangunan.

Kemudian untuk Deputi Pengembangan Regional adalah proyeksi *baseline* dan target makro kewilayahan, proyeksi kebutuhan alokasi anggaran wilayah. Kemudian untuk Deputi bidang Sektor adalah sama juga, proyeksi *baseline* dan target pembangunan.

Kemudian Deputi bidang Pendanaan Pembangunan, dalam kerangka pendanaan dalam hal ini adalah *resource envelope* yang akan menghasilkan pagu anggaran sektor dan arah kebijakan transfer daerah.

Lingkup peran kementerian dalam penyusunan belanja APBN, utamanya adalah belanja K/L yang terdiri dari belanja operasional dan non-operasional. Kemudian di non-operasional itu terdiri dari belanja prioritas dan non-prioritas.

Next, kami mengawal capaian sasaran pembangunan nasional dari sisi perencanaan dari penentuan angka target pembangunan, konsistensi kebijakan dalam RPJMN dan RKP, kemudian target-target yang lebih spesifik tingkat kemiskinan dan miskin ekstrem, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja yang baik dan pengurangan ketimpangan ekonomi dan wilayah.

Dalam pengalokasian, rekomendasi perbaikan, penajaman, dan pengembangan program, dalam hal ini adalah bantuan sosial, perluasan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kepemilikan aset produktif dan pelayanan dasar.

Untuk prakarsa strategis, membangun ekosistem misalnya registrasi sosial ekonomi (Regsosek); penguatan integrasi program, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan, penguatan pemerintah daerah dalam merencanakan penanggulangan kemiskinan, kemudian rekomendasi penggunaan dana desa.

Dalam hal pengendalian, evaluasi dan koordinasi adalah akurasi penyaluran bantuan sosial, cakupan Jamsos, peningkatan konsumsi masyarakat dan koherensi program lintas pemangku kepentingan.

Capaian isu strategi kemiskinan ekstrem, seperti kita lihat di sini. Deviasi target terjadi mulai tahun 2021 karena adanya pandemi Covid, meskipun tingkat kemiskinan terus menurun dan memang untuk mencapai target ini akurasi data penerima program masih rendah, bahkan menurun. Hasil Susenas itu tahun 2024 8%; 2021 43% dan 41% ada 2022, dan ini terus diperlukan pemutakhiran DTKS melalui Regsosek dan integrasi program KL.

Dan target pembangunan yang lain, pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Kebijakannya adalah untuk mendukung pertumbuhan berbasis sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,

dukungan produktivitas, penurunan emisi karbon dan penguatan ketahanan iklim.

Kemudian dalam hal pengalokasian adalah pengelolaan lahan berkelanjutan, pertanian presisi, regenerasi petani, perbaikan rantai nilai pasok; penyiapan energi yang lebih bersih. Kemudian enablnya adalah keterkaitan pangan air sinergi, transisi energi, ketahanan iklim, penguatan pemerintah daerah dalam implementasi SDGs, kemudian reformasi subsidi pupuk.

Evaluasi dan koordinasi adalah perencanaan daerah yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup yang baik.

Ini satu beberapa hal contoh dari sasaran pembangunan dalam hal ini adalah peningkatan nilai tukar petani. Kemudian seperti kita ketahui nilai tukar petani adalah rasio indeks harga yang diterima petani dari produknya dibanding indeks harga yang dibayar petani untuk barang konsumsinya. Jadi ini hanya menunjukkan daya tukar tetapi tidak menunjukkan *volume* penjualan petani. Jadi supaya NTP itu meningkat dari sisi indeks yang diterima petani, perlu terus diupayakan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen serta kepastian harga. Sedangkan dari sisi indeks yang dibayarkan oleh petani perlu dukungan sarana produksi pertanian atau Alsintan.

NTP pada tahun 2024 ditargetkan 105 hingga 108 didorong melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ketersediaan pangan, penguatan data pangan pemanfaatan digitalisasi dan pertanian presisi, produktivitas petani dan penguatan kelembagaan.

Demikian juga untuk nilai tukar nelayan yang ditargetkan 107 sampai 110, di mana akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas nelayan, penguatan kelembagaan usaha nelayan, dan penciptaan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Untuk itu maka dilakukan ada lima hal: peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan prasarana dan sarana perikanan tangkap; peningkatan mutu produk perikanan tangkap; peningkatan kapasitas nelayan, termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi penangkapan; penguatan korporasi nelayan; perlindungan nelayan termasuk fasilitasi perizinan dan pembayaran pembiayaan nelayan. Yang kita lihat perkembangan dari nilai tukar nelayan pada tahun 2022 di awal itu mencapai 107,22.

Kemudian untuk indeks pembangunan manusia dari perencanaan, pengalokasian, dan prakarsa strategis, dalam hal ini yang paling penting adalah dalam hal pengalokasiannya rekomendasi perbaikan penajaman dan pengembangan program, yaitu pemenuhan akses layanan dasar dan pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, percepatan manajemen talenta nasional, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, percepatan penurunan *stunting*, revitalisasi pengarusutamaan gender, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif.

Tahun 2024 adalah merupakan tahun terakhir dari penjabaran RPJMN 2020-2024, karena itu diutamakan pencapaian target-target pembangunan yang termuat dalam RPJPN, RPJMN dan dijadikan rujukan untuk penyusunan RKP 2025 yang akan datang sebagai awal untuk mencapai Indonesia emas 2045.

Kementerian Bappenas memiliki dua program yaitu program perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh 9 deputi, 5 staf ahli, Sesmen dan Sestama dan program dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sesmen dan Inspektorat Utama. Programnya sejak dari perencanaan, pengalokasian, prakarsa strategis, dan pengendalian.

Kemudian RKA K/L tahun 2024 masing-masing adalah sebagai berikut: kegiatan Tanpa Expo dan Kedirgantaraan itu sekitar 1.385.084.000.000,00. Jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1.607,4 miliar. Kemudian setelah diblokir menjadi 1.492 miliar. Jadi lebih rendah dibandingkan tahun ini.

Kemudian ada kegiatan baru yang merupakan pertama adalah penguatan ekosistem kedirgantaraan 210 miliar, kemudian persiapan penyelenggaraan World Osaka Expo 506,9 miliar, sehingga menjadi 2.102.074.000.000,00.

Nah, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan ini masing-masing di Deputi Ekonomi 246,8, Deputi Regional 70 miliar, KSDA 572,8, Deputi Ekonomi 246, ini kalau dikurangi 210 itu artinya 36,8 karena 210-nya adalah untuk apa kedirgantaraan, Regional 70 miliar. Kemudian KSDA itu sekitar 70-an miliar karena 506,9 adalah untuk penyelenggaraan World Osaka. Kemudian PM untuk kemiskinan 21,2 miliar, Sarpras 69 miliar, Polhukhankam 34,9 miliar, pendanaan 46,8 miliar. Kemudian program evaluasi 85,7, staf ahli 55,2, dan di Sestama 260,5 miliar, dan program dukungan manajemen adalah 604,8 miliar, dan Irtama sebesar 10 miliar karena di 604 ini termasuk gaji ya.

Pagu Indikatif tahun 2024 berdasarkan surat bersama dengan Menteri Keuangan, sebagaimana tadi saya sampaikan Rupiah murni terdiri dari 1.438.000.000.000,00, Rupiah murni pendamping 2.957.000.000,00, pinjaman 41.606.000.000,00, dan hibah 5.200.000.000,00, belanja pegawai adalah 168.699.915.000,00, belanja barang adalah 1.845.257.417.000,00, dan belanja modal adalah 88.787.000.000,00.

Indikator kinerja utama Kementerian Bappenas. Pertama adalah dalam hal sasaran kinerja integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional target 2024 adalah 95, kemudian untuk sasaran efektivitas pengendalian pembangunan nasional 96 hingga 100%, kebijakan pembangunan nasional yang inovatif 95 sampai 100%, kemudian untuk Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional itu terdiri dari indeks reformasi birokrasi kementerian 87, indeks kepuasan pemangku kepentingan di bidang perencanaan pembangunan nasional hasil survei 95, dan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional 95.

Rencana kerja tahun 2024, kegiatan prioritas berdasarkan fungsi. Pertama, rencana pembangunan nasional jangka pendek terdiri dari 7, yaitu penentuan angka target kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta rasio gini. Yang kedua, konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan *single salary* bagi ASN, penguatan tata kelola perencanaan dan peran dari *clearing house* untuk menajamkan perencanaan *major project*. Yang keempat, penyelenggaraan Musrenbangnas dalam rangka penyusunan RKP tahun 2025. Yang kelima, penyusunan kebijakan transformasi ekonomi Indonesia. Yang keenam, koordinasi pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim. Yang ketujuh adalah koordinasi strategis penyusunan revisi Undang-Undang SPPN.

Berikutnya adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah. Penyusunan RPJMN 2025-2029 dengan fokus penyiapan fondasi transformasi ekonomi dengan menekankan pembangunan sumber daya manusia untuk semua yang berkualitas, pengembangan kapasitas riset dan inovasi, serta pembangunan berkelanjutan.

Yang ketiga adalah rencana pembangunan nasional jangka panjang. Publikasi secara nasional rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Fungsi pengalokasian, yang pertama adalah penguatan sinkronisasi Krisna dengan Sakti. Yang kedua integrasi pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, koordinasi penyusunan kebijakan dan perencanaan DAK. Yang keempat, penyusunan pedoman pelaksanaan turunan Undang-Undang HKPD. Kelima, fasilitasi perencanaan dan penyiapan proyek KPBU sektor prioritas fasilitas perkotaan. Yang keenam, *market engagement project* KPBU IKN. Yang ketujuh, sosialisasi peraturan pelaksanaan KPBU reguler dan *capacity building* regional. Yang kedelapan, pembiayaan investasi non-anggaran. Yang kesembilan, perbaikan penajaman dan pengembangan alokasi program yang terdiri dari bantuan sosial, perluasan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kepemilikan aset produktif, dan pelayanan dasar.

Untuk fungsi pengendalian terdiri dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja K/L melalui sistem aplikasi E-Monev. Yang kedua, sinkronisasi Krisna, Sakti dan E-Monev. Yang ketiga, monitoring, evaluasi dan pengendalian pencapaian prioritas nasional. Yang keempat, monitoring pengendalian pelaksanaan kerja rencana kerja dan RKA K/L termasuk *spending better*. Yang kelima, *dashboard* pencapaian prioritas nasional, dan keenam penghargaan pembangunan daerah.

Untuk fungsi *enabler* penugasan khusus penyusunan *master plan* ini direktif presiden pengembangan dan penataan kota/kabupaten prioritas, koordinasi strategis pengembangan Jakarta sebagai daerah khusus pasca pemindahan ibukota negara, penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan Papua, peningkatan peran serta kemitraan non-pemerintah melalui koordinasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan ini SDGs, Satu Data Indonesia, koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE), pengembangan Geopark Indonesia, pengembangan registrasi sosial ekonomi, koordinasi persiapan rencana pemindahan ibu kota negara, kesepuluh adalah penguatan *platform* sistem pangan nasional, dan yang terakhir adalah koordinasi penyelenggaraan Osaka World Expo.

Selain *enabler* dalam hal penugasan khusus, ada yang sifatnya inovasi. Pertama adalah pengembangan dan perluasan uji coba monografi desa digital. Yang kedua, pengembangan model kolaborasi lintas sektor Desa Cemara. Yang ketiga, penuntasan *prototyping* N219 Amphibi menuju komersialisasi. Yang keempat, penataan dan penguatan pendampingan pembangunan. Yang kelima, pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial. Yang keenam, peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Yang ketujuh, peningkatan peran serta kemitraan non-pemerintah melalui pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Yang kedelapan, koordinasi pembangunan perkotaan dan desa terpadu. Yang kesembilan, penyusunan *integrated tourism master plan*. Yang sepuluh adalah kemitraan bisnis antara petani dan mitra pelaku pasar melalui PRISMA.

Dan saya mohon izin yang masing-masing kedeputian biar dibacakan oleh deputinya. Silakan Deputi Ekonomi.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

DEPUTI BIDANG EKONOMI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D.):

Terima kasih Pak Menteri.

Mohon izin Bapak Pimpinan. Kami melanjutkan untuk masing-masing kedeputian. Kami mewakili Deputi bidang Ekonomi dan ingin kami menyampaikan bahwa jumlah direktur di bawah kami ada lima direktur dengan Pagu Indikatif sebesar 246 miliar dan 210-nya adalah akan kami fokuskan untuk mendukung pengembangan N219 Amphibi, yang ini dan ini merupakan yang akan kami hibahkan kepada ITB bekerjasama dengan PTDI dan selanjutnya ini merupakan salah satu *pilot project* untuk mengkonkretkan *triple helix* kolaborasi *triple helix* pemerintah, akademisi dan dunia usaha.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Untuk kegiatan prioritas yang di dalam Kedeputian bidang Ekonomi, pertama adalah kami menyusun sasaran makro ekonomi dan ini termasuk di dalamnya selalu kami lakukan analisis perkembangan ekonomi Indonesia dan global, menggunakan dan mengembangkan model ekonomi, termasuk menetapkan kerangka ekonomi makro nasional dan provinsi Pak yang selalu kita bahas di setiap pertemuan Komisi XI.

Selain itu kami juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari koordinasi strategis pengendalian inflasi dalam tim pengendali inflasi nasional. Kami juga punya agenda besar Bapak-Ibu yaitu menyusun transformasi ekonomi Indonesia yang rencananya *master plan* akan diselesaikan tahun depan, termasuk bagaimana di dalamnya merencanakan kebijakan pengembangan ekonomi dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang, termasuk di dalamnya proses apa rencana industrialisasi investasi perdagangan dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Selanjutnya juga kami *output* yang lain yang kami akan gulirkan adalah penguatan ekosistem kedirgantaraan, terutama penuntasan *prototyping* N219 Amphibi menuju komersialisasi.

Demikian Pak Menteri dan Bapak-bapak Pimpinan sidang hari ini dari kami. Terima kasih.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Selanjutnya Deputi.

KETUA RAPAT:

Lanjut.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Deputi Regional.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL (Dr. Ir. HIMAWAN HARIYOGA DJOJOKUSUMO, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Menteri, Bapak-Ibu Pimpinan.

Untuk Kedeputan bidang Regional ada lima direktorat ya dengan Pagu Indikatif sebesar 70 miliar. Ada delapan kegiatan strategis yang akan dilakukan. Pertama adalah penyusunan RPJPN 2025-2029 dan RKP 2025. Yang kedua adalah mengembangkan Jakarta sebagai kota global pasca pemindahan ibu kota Nusantara. Ketiga adalah percepatan pembangunan Papua. Keempat, koordinasi strategis reforma agraria dan penanggulangan bencana. Yang kelima adalah *master plan* penataan kabupaten/kota prioritas. Yang keenam, efektivitas perencanaan dan transparansi lokasi prioritas DAK. Yang ketujuh koordinasi strategis perencanaan persiapan pembangunan dan pemindahan ibukota Nusantara serta pengembangan daerah mitra, dan yang terakhir adalah penajaman kebijakan dana desa.

Demikian Pak Menteri, Bapak Pimpinan yang bisa kami laporkan dari Kedeputan bidang Regional. Terima kasih.

**DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (Dr. VIVI YULASWATI, M.Sc.):**

Terima kasih Pak Menteri.

Izin menyampaikan melanjutkan mengenai kegiatan prioritas untuk Kedeputan bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Jadi di bawah Kedeputan KSDA terdapat lima direktur dengan Pagu Indikatif cukup besar untuk 2024 karena ada penugasan terkait Osaka World Expo. Beberapa kegiatan prioritas termasuk di dalamnya adalah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penyiapan transisi energi, termasuk juga kerangka regulasinya. Ini juga terkait dengan transportasi bersih, utamanya terkait dengan EV pada saat tahun 2024 ini.

Kemudian untuk lahan dan pertanian berkelanjutan, tentunya terkait di dalamnya ada koordinasi dengan Satu Data Indonesia untuk penyiapan satu data pangan dan tentunya terkait dengan pemerintah daerah untuk memperluas lahan pertanian berkelanjutan.

Untuk ekonomi biru, ini dikembangkan tentunya dengan konservasi, rehabilitasi dan juga pendanaan untuk mendukung kegiatan ekonomi biru yang ke depan potensinya akan menjadi sangat besar.

Selain itu, pengelolaan hutan berkelanjutan tentunya terkait di dalamnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung perkebunan dan juga industri hutan, termasuk juga pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Selain itu, untuk tahun 2024 kami juga banyak melakukan persiapan dalam sumber daya air, mengingat tahun depan akan kemarau cukup panjang, sehingga beberapa studi dan juga koordinasi dengan BRIN, KLHK sudah mulai dilaksanakan.

Untuk ekonomi sirkular ini lebih luas lagi, termasuk juga para millennial, perguruan tinggi untuk mendorong tidak saja *reduce*, tetapi juga *reuse* dan bahkan sampai dengan *recycle industry*-nya. Tentunya melengkapi penyusunan RPJMN 2025-2029 dan juga RKP 2025, nah yang terakhir adalah penugasan untuk Osaka Word Expo yang telah ditetapkan melalui Kepmen maaf SK Menko Perekonomian Nomor 269 Tahun 2023 yang menugaskan Kementerian Bappenas sebagai *Responsible National Authority* untuk mempersiapkan penyelenggaraan keikutsertaan pemerintahan Indonesia dalam Expo 2025.

Demikian Pak Menteri. Terima kasih.

**DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN
KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (Drs. AMICH
ALHUMAMI, M.A., M.Ed., Ph.D.):**

Baik, kami melanjutkan untuk Kedeputian bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.

Di bawah kedeputian ini terdapat empat direktur yang menangani kesehatan, pendidikan, pendidikan tinggi dan Iptek dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga. Pagu Indikatif yang tertulis di sini sebesar 21,2 miliar dan akan digunakan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain ada penugasan khusus dari Bapak Presiden untuk menyusun desain besar manajemen talenta nasional dan juga koordinasi percepatan penurunan *stunting*, ini pengalihan tugas yang semula berada di Sekretariat Wakil Presiden. Termasuk juga penyusunan RPJMN 2025-2029 dan juga RKP 2025, dan juga penyusunan peta jalan untuk pembangunan kesetaraan gender.

Saya kira itu yang dapat ditambahkan Pak.

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (ERVAN MAKSUM, ST, M.Sc.):

Terima kasih.

Melanjutkan di kegiatan prioritas Deputi Sarana Prasarana. Jumlah direktornya ada lima orang yaitu sumber daya air, transportasi, permukiman dan KTI dan sektor strategis. Pagu indikatifnya yang dibutuhkan adalah 69 miliar. Adapun kegiatan prioritas yang pertama adalah dalam hal ini untuk mengatasi keterbatasan anggaran, kita mencari pada *enabler* atau prakarsa kreatif. Yang pertama adalah koordinasi pengendalian banjir. Kemudian adalah dukungan untuk menyelesaikan PSN karena dibutuhkan beberapa infrastruktur pendukung untuk suksesnya PSN, dan berikutnya adalah koordinasi penanganan permukiman kumuh, yang ini mungkin menjadi target dan butuh inovasi pembiayaan juga, koordinasi pelaksanaan sistem logistik nasional, dan berikutnya adalah koordinasi percepatan pemenuhan akses infrastruktur dasar serta inisiatif pendanaan melalui Inpres.

Yang berikutnya yang mungkin juga semuanya sudah kita kerjakan saat ini adalah koordinasi Inpres jalan daerah yang posisinya hari ini di tahun 2023 sudah berlangsung akan berlanjut di 2024. Kemudian adalah koordinasi strategis pelaksanaan modernisasi irigasi karena memang kita kurang di sini. Yang berikutnya adalah pemanfaatan Satu Data Indonesia dalam perencanaan infrastruktur, di sini kita menggunakan satu data untuk memberikan subsidi tepat sasaran terutama di sektor transportasi.

Berikutnya adalah koordinasi percepatan penyelesaian konstruksi 65 bendungan dan penuntasan pembangunan yang terbangun dalam rangka memenuhi target irigasi air baku dan listrik. Berikutnya adalah kombinasi tata kelola perencanaan persampahan, yang ini lebih banyak kepada *enabler* yaitu menyelesaikan dengan skema-skema yang lebih inovatif. Yang terakhir adalah koordinasi pengembangan angkutan umum massal perkotaan di enam kota metropolitan.

Demikian, terima kasih.

**DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN
PPN/BAPPENAS (ERWIN DIMAS):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami sampaikan mengenai kegiatan prioritas di Kedeputian Pendanaan. Di sini kami menangani ada lima direktorat lima orang, dengan Pagu Indikatif kurang lebih sebanyak 46,8 miliar. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat kami paparkan. Yang pertama adalah terkait dengan penyusunan RPJM 2025-2029 tahun depan, khususnya terkait pendanaan. Yang kedua, penyusunan RKP 2025, kemudian penyusunan Pagu Belanja K/L dan DAK serta daftar proyek prioritas, hal ini kami lakukan bersama dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Yang berikutnya adalah pengendalian dan evaluasi pendanaan; perluasan pembiayaan alternatif dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri. Yang terakhir mengenai sinkronisasi sistem. Tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan mengenai Krisna, Sakti dan lain sebagainya dan kemudian juga terkait dengan persiapan hibah Compact II dari MCC.

Output-nya ada delapan *output* yang kami rencanakan. Pertama, tentu saja terkait dengan RPJMN RKP. Yang kedua adalah pagu indikatif, pagu anggaran dan seterusnya, itu tiap tahun kami lakukan. Kemudian data perencanaan antara beberapa sistem yang ada mengalir dengan tanpa ada hambatan. Kemudian beberapa dokumen-dokumen terkait dengan pendanaan jangka menengah dan tahunan dari berbagai sumber yang ada, baik dari dalam negeri, luar negeri maupun SBSN dan hibah dan sebagainya.

Di sini indikator sasaran program kami ada ada empat. Pertama adalah terkait dengan rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional 92%, keselarasan pendanaan kegiatan PHLN, PHDN dan SBSN 92%, rekomendasi intervensi pendanaan inovatif 92%, dan indeks perencanaan 95%, dan beberapa indeks lainnya. Demikian Bapak kami laporkan.

Terima kasih.

**DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (DR. MUHAMMAD CHOLIFIHANI, SE,
MA):**

Pimpinan yang kami hormati,

Dari untuk kegiatan Kedeputian bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, kami berjumlah direktur ada 4 orang, dengan anggaran Pagu Indikatif 25,5 miliar. Beberapa kegiatan prioritas yang akan kami lakukan adalah penguatan dan pemanfaatan registrasi sosial ekonomi Regsosek, kemudian reformasi perlindungan sosial, yang lainnya adalah bagaimana kita mengembangkan UMKM untuk ekonomi hijau. Kemudian koordinasi pelaksanaan strategi nasional revitalisasi pendidikan vokasi, itu

juga menjadi kegiatan prioritas kami, afirmasi penggunaan tenaga kerja lokal di IKN. Kemudian pelaksanaan strategi nasional administrasi kependudukan untuk mengembangkan statistik hayati, itu juga kegiatan prioritas kami. Lalu penyusunan RPJMN dan RKP, kemudian implementasi untuk model-model kemitraan strategis untuk UMKM juga menjadi kegiatan prioritas, lalu perlindungan-perlindungan sosial adaptif, dan terakhir adalah kolaborasi lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan dan juga dengan Desa Cemara.

Demikian Pak Menteri, terima kasih.

**DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (BOGAT WIDYATMOKO, SE, MA):**

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

Kami melanjutkan dengan kegiatan di kedeputan bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan. Jadi kami di kedeputan Polhukhankam ada lima direktorat dan selama satu tahun Pagu Indikatifnya adalah 34,4 miliar. Dari dana-dana tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas, yaitu penyusunan *roadmap* industri pertahanan dengan skema *spend to invest* yang ini tentunya dalam rangka kita pendirian industri pertahanan dan juga pembangunan harus kita Indonesia. Kemudian penyusunan *roadmap* peningkatan kualitas pelayanan kepolisian yang humanis dan berbasis kesetaraan gender. Selanjutnya adalah penyusunan *roadmap* transformasi tata kelola keamanan siber yang tentunya ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk tahun-tahun ke depan, penyusunan dokumen rencana induk SPBE 2025-2045 dalam rangka menuju Indonesia Emas, dan juga *review* sistem *single salary* dan reformasi sistem pensiun.

Kemudian Bapak-Ibu sekalian selanjutnya adalah kegiatan prioritas yang terkait dengan Pro PN kerja sama selatan-selatan dan Triangular tahun 2024, ini saya kira salah satu kepedulian Bappenas dalam mengelola negara-negara di Pasifik untuk bisa memberikan informasi-informasi yang positif terhadap Indonesia. Kemudian pengukuran Indonesia *foreign policy index* tahun 2023, ini karena memang kegiatan yang terkait dengan kebijakan luar negeri itu ada di beberapa kementerian, saya kira Bappenas sebagai pengampu beberapa kementerian saya kira bisa menyusun *index foreign policy* ini.

Kemudian pengukuran indeks pembangunan hukum tahun 2023, ini saya kira sebagai salah satu indikator pada prioritas nasional yang ke-7 dari RPJMN yang ada sekarang. Yang penting lagi adalah Indonesia menjadi *Co-chairmanship* Indonesia pada *Global Partnership for Effective Development Cooperation*, di mana Bappenas menjadi salah satu *Co-Chair* dalam GPEDC tersebut. Pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah atau *Open Government* Indonesia tahun 2024. Ini sudah merupakan kegiatan yang sangat rutin dan kita lakukan dalam rangka bagaimana transformasi Indonesia.

Kemudian juga dalam tahun 2024 akan banyak penyusunan rekomendasi kebijakan kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Terima kasih.

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (ERWIN DIMAS):

Untuk Kedeputan bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, kami memiliki empat orang direktur, dengan Pagu Indikatif direncanakan sebanyak 85,7 miliar.

Di sini kegiatan prioritas kami ada enam. Yang pertama, kami mengkoordinasikan terkait penyusunan RPJMN dan RKP 2025 sampai dengan 2029 dan didukung oleh sistemnya yaitu evaluasi baik dari sistem E-Monev maupun juga terkait dengan satu data, dan yang terakhir adalah mengenai pengelolaan manajemen risiko ini hal yang baru, itu juga akan kami lakukan di tahun depan.

Ada enam *output* utama yang kami rencanakan. Yang pertama tentu saja terkait dengan RPJM dan RKP yang disusun dengan baik dan efektif. Kemudian kerangka logis dari pembangunan di berbagai indikator yang ada. Yang ketiga adalah sistem kami E-Monev itu terharmonisasi dan terkoneksi dengan berbagai sistem yang telah ada, dan yang keempat adalah rekomendasi kami untuk tindakan korektif baik di pusat maupun di daerah, dan yang kelima adalah data pemerintah pusat daerah yang terintegrasi dalam tata kelola SDI, serta terakhir mengenai komite manajemen risiko pembangunan nasional.

Indikator sasaran program kami yang terkait dengan dukungan terhadap Kementerian Perencanaan adalah pertama, indeks perencanaan bidang pemantauan sebanyak 96%, persentase kinerja pengendalian 97%, persentase rekomendasi kebijakan 96%, indeks kepuasan pemangku kepentingan 96, RPJM yang konsisten dengan berbagai dokumen lainnya 95%, serta terkawalnya sasaran pembangunan nasional sebanyak 96%.

Demikian kami laporkan. Terima kasih.

INSPEKTUR UTAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (Dr. Rr. TRISACTI WAHYUNI, AK, M.Ak.):

Izin menambahkan.

Dari Inspektorat Utama, kami sampaikan ada dua jabatan Eselon II dua orang. Satu, Inspektur bidang Administrasi Umum dan satu lagi Inspektur bidang Kinerja Kelembagaan. Kami mendapatkan Pagu Indikatif 10 miliar yang akan dimanfaatkan untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan Tusi Bappenas yang kami rumuskan ke dalam lima kegiatan yang pertama adalah untuk pendampingan pengembangan manajemen risiko pembangunan

nasional, di mana ini adalah inisiatif baru yang tahun 2023 ini baru terbit Perpres Nomor 39 Tahun 2023 yang nanti pengampu intinya adalah di Bappenas nanti ada di Kedeputian PEPP yang tadi telah di sedikit disampaikan.

Kemudian kami juga melakukan dua kegiatan utama inspektorat pengawasan dan konsultasi, dari sisi pengawasan kami menysasar aspek kinerja dan anggaran, demikian juga untuk kegiatan konsultasi kami juga akan fokus dari sisi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Bappenas. Di luar itu ada dua kegiatan pendampingan, pertama adalah pengawalan penyusunan RPJMN 2025-2029 dan terakhir untuk pengawalan penyusunan arah kebijakan Bappenas dalam hal ini adalah Renstra penyiapan Renstra 2025-2029 nanti.

Saya kira demikian. Terima kasih.

**SEKRETARIS UTAMA KEMENTERIAN PPN/SESTAMA BAPPENAS
(TAUFIK HANAFI):**

Baik, yang terakhir.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami hormati dan kami muliakan,

Untuk Sekretariat Kementerian PPN/Sestama Bappenas, ini mengampu dua program, pertama adalah program perencanaan pembangunan nasional dan program dukungan manajemen. Untuk program perencanaan pembangunan nasional ini Pagu Indikatifnya 260,5 miliar diampu oleh tiga kepala pusat. Kegiatan prioritasnya meliputi peningkatan kapasitas SDM perencana baik di pusat maupun di daerah, pembinaan dan pengembangan perencana, di sini bisa kita lihat *output* untuk kegiatan peningkatan kapasitas, Diklat SDM perencana pusat dan daerah itu hampir 2000, demikian juga dengan pembinaan dan pengembangan ini mencakup 1000 perencana. Kegiatan lainnya meliputi dukungan peningkatan kapasitas perencanaan Bappeda provinsi dan juga ini akan kita lakukan sosialisasi secara terpadu melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Kementerian PPN/Bappenas.

Indikator-indikator yang akan digunakan salah satunya adalah persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sedangkan program dukungan manajemen ini Pagu Indikatifnya adalah 604,8 miliar dengan jumlah kepala biro lima orang. Kegiatan prioritasnya mencakup pelayanan kepegawaian di sini termasuk gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, pengadaan dan pengelolaan BMN, peningkatan kapabilitas SDM Bappenas untuk manajemen risiko. Demikian juga yang terkait dengan penguatan *integrated digital workspace* dan pemugaran dan revitalisasi gedung cagar budaya Kantor Kementerian PPN Bappenas.

Indikator sasaran di sini adalah indeks reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 87, indeks kepuasan pengguna layanan 95, dan juga persentase integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional 97%. Barangkali itu Bapak yang kami bisa sampaikan.

KETUA RAPAT:

Masih ada?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Ya, tadi berdasarkan deputi dan karena itu kami juga mengusulkan usulan tambahan anggaran. Seperti saya sampaikan tadi, dibandingkan 2024 kita menurun memang dan kita ada dua kegiatan yang sifatnya pertama hibah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa acara World Expo di Osaka. Seperti kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan dengan terbitnya Perpres Nomor 39 Tahun 2023 terkait manajemen resiko pembangunan nasional, ini sebenarnya intinya adalah GRC jadi *Governance Risk and Compliance* untuk semua proyek-proyek atau ya proyek-proyek nasional, *major project*, dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional yang *revenue base* itu diharapkan untuk bisa diukur GRC-nya.

Usulan tambahan anggaran, pertama adalah pengembangan evaluasi kontribusi K/L terhadap kinerja pembangunan nasional 50, penguatan manajemen risiko dan pengendalian perencanaan wilayah 150, penguatan kapasitas SDM perencana dan mengawal pencapaian sasaran Indonesia 100 miliar, Indonesia Emas. Ini karena kita juga 40 kabupaten/kota yang diminta oleh Presiden untuk diselesaikan *master plan*-nya pada tahun yang akan datang.

Demikian Bapak Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran Deputi Eselon I yang telah memaparkan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2024.

Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi XI yang saya hormati,

Dari pagu indikatif yang disampaikan tadi untuk Bappenas yaitu sebesar 2,102 triliun, itu termasuk kegiatan baru yang nilainya 716,9 miliar, sehingga kalau di luar dari dua kegiatan baru itu adalah 1,385, Pagu untuk 2023 1,607 sebelum diblokir. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian.

Kementerian Bappenas juga meminta tambahan anggaran sebesar 300 miliar, yaitu pertama untuk pengembangan evaluasi kontribusi kementerian lembaga terhadap kinerja pembangunan nasional. Kemudian penguatan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan rencana yang meliputi manajemen risiko perencanaan, penguatan pengendalian perencanaan wilayah, dan ketiga penguatan kapasitas SDM perencana dalam mengawal pencapaian sasaran Indonesia Emas, total sebesar 300 miliar rupiah. Saya kira itu paparan dari Pak Menteri.

Bapak-Ibu sekalian, Teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Seperti biasa saya kembalikan untuk melakukan pendalaman. Dari PDPI dulu, Pak Andreas silakan.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI,
Pak Menteri PPN/Bappenas beserta jajarannya.

Di dalam KEM-PPKF Tahun 2024 yang disampaikan pemerintah, itu disampaikan mengenai anggaran berbasis kesejahteraan. Nah, ini belum kami lihat ini Pak Menteri indikator-indikator di dalam implementasi anggaran berbasis kesejahteraan ini dan apa implikasinya terhadap kebijakan belanja K/L. Kan kalau dinyatakan anggaran berbasis kesejahteraan tentu ada indikator-indikatornya kan. Nah, bagaimana indikator-indikator ini pencapaian sasaran tersebut, kemudian menjadi kebijakan yang diarahkan kepada prioritas belanja K/L. Ini yang belum kami lihat ini penjabarannya Pak Menteri.

Terus yang kedua adalah mengenai secara khusus saya melihat nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan itu ya pergerakannya itu *enggak* cukup besar, padahal di situ sebetulnya disampaikan mengenai masalah produktivitas petani maupun nelayan, bahkan kalau kita lihat angka 107 itu sebetulnya itu kembali kepada tahun 2022 kalau yang tadi draf tadi itu sudah mencapai 107. Jadi sebetulnya mestinya kita menginginkan apa *sih* langkah terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ini karena kalau kita lihat sektor pertanian dan sektor nelayan adalah penyerap lapangan pekerja yang besar. Ini yang kami belum lihat.

Kemudian tadi disampaikan mengenai program dari Sestama itu adalah sosialisasi dan publikasi RUU RPJPN 2025-2045, tapi saya belum melihat mengenai proses pembahasan RUU itu sebenarnya prosesnya bagaimana, targetnya kapan Pak Menteri? Karena ini sudah bulan Juni, akhir Juni 2023 ya. Jadi kami belum tahu ini, ini tapi sudah publikasi, padahal semestinya intinya adalah mengenai proses pembahasan karena kan bentuknya undang-undang. Nah, kalau undang-undang berarti kan prosesnya itu kan harus dibahas bersama dengan DPR. Nah, ini yang kami belum lihat, ini masuk apakah masuk program kerja tahun ini dan *timeline*-nya seperti apa begitu ya? Karena banyak sekali program tadi yang disampaikan mengacu

kepada program itu adalah untuk RPJMN 2025-2029, tetapi kalau undang-undangnya sendiri itu belum kapan akan menjadi katakana yang menjadi target, ini kan jadi apa semua rencana tadi itu akan menjadi tergantung kepada hasil penyelesaian daripada undang-undang ini ya.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andreas.

Dari Golkar?

F – PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc. IP., M.Si.):

Saya Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Kang Agun.

F – PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc. IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Dari Fraksi Partai Golkar, Pak Menteri dan segenap para Deputi dan para Direktur, bertitik tolak dari fungsi dewan, fungsi Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi representasinya tentunya harus melakukan langkah-langkah mengagregasi mengartikulasi dari apa yang dimintakan di daerah-daerah yang kami wakili Pak. Jadi dalam menjalankan fungsi representasi ini menjadi penting Bappenas.

Nah, pertanyaannya yang muncul hari ini adalah pasca diundangkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, begitu pula juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk IKN, termasuk peluncuran yang diharapkan tahun ini apa N219 Pak yang kami melihat respon di bawah itu cukup bagus untuk N219 ini sebagai sebuah karya yang monumental menjadi peninggalan hasil akhir dari kepemimpinan Pak Jokowi Pak. Kalau ini bisa di-*launching* dan jalan, ini N219 ini luar biasa Amphibi ini, tapi saya tidak bertanya soal itu Pak, tapi itu saya doronglah begitu.

Dalam menjalankan fungsi representasi ini, kembali kepada Bappenas, saya hanya ingin fokus terhadap fungsi pengalokasian dan fungsi pengendalian Pak dari Bappenas itu karena berulang kali kami kalau ke bawah itu selalu ditanyakan soal itu Pak, bagaimana pasca Undang-Undang HKPD ini Pak berkaitan dengan pengalokasian untuk DAU, untuk DAK, berikutnya juga ada kegiatan-kegiatan dari dinas-dinas yang terkait dengan usulan yang mereka usulkan ke pusat Pak, bagaimana Pak dengan infrastruktur pertanian kita, ketahanan pangan kita, irigasi kita, jalan kita yang

sudah kami usulkan ke pusat. Nah, ini hampir semua pada waktu itu Pak Menteri. Saya mantan Ketua Komisi II hanya mampu menanyakan itu ke Kemendagri Pak, mentok di Kementerian Keuangan, mentok di Kementerian Bappenas, jadi *enggak* pernah bisa ketemu. Nah, sekarang saya pindah ke Komisi XI dengan harapan bisa mempertemukan ini semua, ketemu dengan Menteri Keuangan, ketemu dengan Menteri Bappenas yang notabene sahabat saya Pak Suharso Manoaarfa yang saya hormati.

Nah, oleh karena itu Pak Ketua, saya mohon kalau bisa ini jadi salah satu kesimpulan lah agar fungsi pengalokasian terkait dengan penguatan sinkronisasi Krisna dengan Sakti. Ini kalau bicara Krisna dengan Sakti ini Pak waduh sebelahnya Pak Kyai itu, Pak Gus itu, Gus Irawan. Mohon maaf Pak Gus, umur kalau sudah sepuh kadang-kadang suka *leyot*. Jadi saya masih mencatat selalu kalau bicara soal Krisna, bicara Sakti, bicara data, itu kan konstituante kami Pak mau masuk *enggak* bisa masuk masuk, susah betul, itu satu Pak. Jadi bagaimana hal ini?

Yang kedua, koordinasi penyusunan kebijakan dan perencanaan DAK. Nah, ini kan diharapkan sebetulnya kami yang menjalankan fungsi representasi setidaknya mengetahui tentang aturan itu Pak, tentang prosesnya, tentang prosedurnya begitu ya, bagaimana sih DAK, kemudian pedoman pelaksanaan turunan Undang-Undang HKPD. Nah, kami ini semua terlibat di HKPD, tapi RPP-nya ya Pak Ketua saya juga *enggak* tahu apa sudah jadi PP-nya, apakah rencana peraturan pemerintahannya juga dikomunikasikan dengan kita. Nah, di sini ada juga pedoman pelaksanaan terkait juga dengan Bappenas. Nah, jadi ini hal-hal yang menurut pandangan kami dalam rangka fungsi pengalokasian ya dari perencanaan pengalokasian-pengalokasian itu sedapat mungkin kami yang menjalankan fungsi representasi di Dapil begitu Pak itu mengetahui, apakah bentuknya mau sosialisasi di Dapil tentang ini semua supaya mereka itu jelas *loh* kalau untuk DAU begini, untuk DAK begini, itunya begini, bersama-sama dengan Bappenas.

Pak Ketua, jujur saja *nih* kita dengan Bappenas turun ke bawah ini hampir-hampir *enggak* pernah Pak begitu Pak, ya turunlah bareng-bareng sosialisasi. Nah, ini sehingga ada korelasinya dengan anggaran tambahan Pak. Di anggaran tambahan yang poin pertama itu ada korelasinya kalau menurut saya yang terkait dengan yang pertama itu pengembangan evaluasi kontribusi K/L terhadap kinerja pembangunan nasional, *review* belanja K/L, kualitas *output*, kualitas belanja, dan sebagainya, sehingga menurut hemat saya kalau memang lebih diarahkan ke sana ya mungkin *enggak* ada masalah Gus ya? Kita setuju sekali ini. Jadi kalau anggaran yang tahun lalu *wong* sekarang saja dikurangi, *enggak* mungkin kita kurangi lagi begitu Pak, bahkan kalau perlu usulan tambahannya kita dorong untuk bisa berhasil.

Nah, begitu juga dengan fungsi pengendaliannya Pak. Itu fungsi pengalokasian. Nah, dalam rangka fungsi pengendalian ini *monitoring* evaluasi pelaksanaan rencana Renja K/L melalui sistem aplikasi E-Monev dan sebagainya. Nah, Sakti kembali, Krisna kembali. Nah, ini kadang-kadang kami terima dokumen begitu ya, kita kirim ke Bappenas, setelah itu sudah *enggak*

ngerti lagi kita Pak, apakah diloloskan, disetujui atau tidak atau bagaimana nasibnya, apakah jumlahnya tetap, programnya sama atau malah berubah atau malah mungkin tidak sama sekali. Ya ini, ini problem-program mohon maaf Pak agak panjang ini agak teknis karena yang namanya fungsi representasi ya seperti itu suara rakyat itu memang harus disampaikan dalam forum ini Pak Menteri, sehingga harapan kami kalau sudah pada posisi itu maka yang terpenting dalam kesimpulan keputusan rapat hari ini Pak Ketua saya usulkan agar ada semacam peningkatan efektivitas komunikasi. Peningkatan komunikasi fungsi pengalokasian dan fungsi pengendalian anggaran pusat dan daerah begitu.

Nah, yang kami maksudkan diharapkan nanti kalau Gus Irawan kembali ke Medan begitu ya, Pak Misbakhun pun kembali ke Jawa Timur, saya kembali ke Jawa Barat begitu ya, kalau saya sebut Jawa Barat sudah ada Ibu Putri, ada ada apa Kyai begitu kan, banyak lagi ada Vera dan lain sebagainya. Kalau ke Medan di sini sudah ada Pak Hidayatullah, Jawa Timur sudah ada Ibu Indah, ada Pak Sihar begitu kan, ya Sumatera sama lah ya.

Nah, jadi kami menjalankan fungsi representasinya nyaman Pak Menteri. Jadi kalau kembali ke daerah itu bisa kami sosialisasikan begini, prosesnya begini. Nah, ini semua adalah filosofi Edward dalam rangka menjaga hambatan-hambatan implementasi kebijakan publik yang salah satu faktor utama kegagalan implementasi kebijakan publik, Edward mengatakan adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini mesti dijaga, dirawat agar itu pula yang membuat komunikasi bisa dua alternatif dampak, pertama terjadinya korupsi tapi kita dimaksudkan untuk bukan untuk itu, tapi dimaksudkan komunikasi untuk mengefektifkan agar program tepat sasaran sebagaimana tujuan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari dari Gerindra? Dipersilakan, silakan.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Kayaknya belum itu.

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Baik terima kasih.

Pimpinan, Bapak-Ibu Sahabat Anggota Komisi XI yang terhormat,
Yang kami hormati Pak Menteri PPN/Bappenas dan seluruh jajaran,
Hadirin sekalian yang kami hormati, kami muliakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, tadi saya terundang bicara karena disebut-sebut nama tadi, cuma kalau sudah sebut Gus itu Pak, *tak* usah pakai Bapak, Gus saja sudah begitu, cuma ya risikonya Pimpinan kalau sudah sebut Gus saja salah mencium tangan begitu saja.

Tapi soal yang terakhir tadi Kang Agun, kalau saya sudah *enggak* berani lagi saya *ngomong* Pak di Dapil itu Pak, *enggak* berani lagi, tapi mudah-mudahan kita sepakat dengan yang disampaikan tadi ke depannya bisa lebih baik.

Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Ya saya kira ya di masa lalu kalau disebut PPN/Bappenas itu *waduh* itu gudangnya, ya bukan masa lalu saya kira sekarang juga sama lah ya karena itu memang apa PPN/Bappenas sangat strategis menurut saya karena bagaimanapun semua kegiatan itu didahului dengan perencanaan dan itu *lead*-nya adalah PPN/Bappenas.

Nah, karena itu kita menaruh harapan ya menaruh harapan besar bagaimana kemudian Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran di dalam mengawal berbagai program-program yang sudah dicanangkan itu tentu mencapai sasaran dan tentu apresiasi Pak Menteri IKU-nya Kementerian PPN/Bappenas saya kira bagus, ya target-target untuk 2024 juga ditetapkan tinggi ya semuanya, saya kira memang apa PPN/Bappenas itu harus punya standar tinggi lah karena tadi ya ini gudangnya orang-orang teknokrat, negarawan, orang-orang pintar semua. Jadi IKU-nya pun 90-an digit besar begitu, 95, 96 dan seterusnya dan berharap itu bisa dicapai Pak Menteri.

Nah, menarik beberapa inisiatif baru ya, tadi beberapa hal disampaikan penerapan manajemen risiko pembangunan nasional. Wah, saya agak *anu*, oh baru ini Pak Menteri ya. Padahal di banyak kegiatan kita selalu bicara soal manajemen risiko. Iya, tetapi dalam membangun bangsa kita baru ada inisiatif sekarang soal *risk management* ini. Mungkin di banyak hal *sih* sudah kita lakukan, tapi barangkali ini sesuatu yang apa namanya dirumuskan sudah lebih spesifik begitu. Saya kok tertarik mungkin nanti ingin mengetahui lebih jauh soal ini karena bagaimana pun penting sekali saya kira dalam banyak hal sering kita Pak Menteri ke daerah, ada bangun katakanlah di masa lalu bendungan misalnya, *eh* ternyata akhirnya *enggak* ada, pemanfaatannya apa seringkali terjadi yang dibutuhkan di daerah lalu tidak sesuai dengan yang dibangun oleh pusat katakanlah. Masih banyak hal terjadi hal demikian begitu. Namun, dengan saya kira dengan penerapan manajemen risiko, hal-hal demikian itu akan bisa saya kira kita hindarkan ya, sehingga kemudian apa yang kita rencanakan adalah sesuatu yang memang dibutuhkan dan kemudian dimanfaatkan secara optimal bagi tadi ya ini berbasis pada berbasis kesejahteraan tadi ya.

Nah, saya kira karena ini inisiatif baru Pimpinan, saya kira kita kalau boleh setiap apa namanya ya progres mungkin kita boleh dilaporkan untuk apa ya meyakinkan kita, memastikan bahwa itu sesuatu memang yang pasti

kita butuhkan tetapi sebuah rumusan yang sudah sesuai dengan apa kondisi lapangan yang ada karena tentu Pak Menteri pun sangat paham kita ini semua punya Dapil yang seringkali turun dan banyak hal yang informasi yang langsung kita lihat, kita rasakan, kita dapatkan mungkin bisa menjadi masukan bagi PPN/Bappenas.

Berikutnya adalah nah ini hal penting lagi *nih* Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi XI, tadi oleh Deputi bidang Ekonomi menyampaikan *masterplan* transformasi ekonomi Indonesia akan diselesaikan. Saya ingin *anu*, akan diselesaikan tahun depan Ibu ya? Tahun depan ini diselesaikan? Satu *masterplan* transformasi ekonomi Indonesia. Wah, ini hal menarik juga ini.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Jadi selama ini belum ada *master plan*?

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Ya tahun depan akan diselesaikan tentu yang selama ini belum ada atau ada mau direvisi atau apa saya *enggak* paham.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Ya, yang ada di transformasinya.

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Iya, *nggak* begini Pak, kenapa menurut saya ini sangat amat penting karena menurut saya struktur ekonomi yang ada ini mungkin bahkan begitu berpeluang menyimpang dari undang-undang konstitusi kita.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Sehingga perlu ditransformasikan.

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Karena kami Gerindra Pak Menteri tahulah kita itu kan Pasal 33 Pak, saya *enggak* tahu ini arah transformasi ini nanti ke mana, maka ini kedua hal saya kira tadi soal manajemen risiko, transformasi ekonomi Indonesia Pimpinan mungkin kita sebagai mitra mungkin perlu untuk diinformasi lebih awal untuk tadi memberikan katakanlah buah-buah pikiran karena teman-teman di Komisi XI ini kan banyak para ahli juga ya kan, Prof Hendrawan hari ini *enggak* masuk, Pak Andreas punya pengalaman panjang, dan lain-lain saya kira kita mungkin dapat memberi masukan juga.

Sama N219, periode lalu saya kebetulan di Komisi VII Pak Menteri, bermitra dengan Menristek begitu, tentu di dalamnya ada PT DI, ingin konfirmasi saja bahwa menurut saya *nih* Bapak-Ibu yang kami hormati, ini

sebuah kebutuhan kita ya Indonesia itu sangat butuh kita negeri kepulauan ini sangat butuh pesawat setipe N219 untuk menghubungkan pulau-pulau begitu. Saya misalnya hari ini mau ke Dapil sama Pak Sihar, saya Dapil-nya Sumut II Pak Menteri, kami harus terbang ke Medan dulu Pak, Ya kan sesekali mungkin ada ke Silangit begitulah, jauh, padahal ada juga sesungguhnya bandara di Sibolga, di Tapanuli Tengah katakan. Mandailing Natal, Pak Sihar, sedang membangun bandara juga begitu.

Terlalu pendek. *Enggak* maksud saya kalau tipe N219, saya kira bisa akan masuk ke situ, ini kan tipenya yang isi berapa ya kalau *enggak* salah 70 ah? Isi 19, Pak Sihar dan saudara-saudaranya sudah bisa semua masuk bisa di situ begitu. *Enggak*.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak Sihar bawa *private jet* sendiri Pak.

F – P. GERINDRA (H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA.):

Ya kan kalau tahun-tahun politik *private jet*-nya beliau simpan Pak, ya kan, iya simpan lah kan begitu. *Enggak*, soal ininya *roadmap*-nya seingat saya dulu bahkan ada kerja sama Korea atau apa, ini sudah dipesan di luar negeri kalau *enggak* salah penjelasan waktu itu minta konfirmasi ini, tapi kemudian belum terlalu apa namanya untuk ini kan tujuan komersialisasi. Saya kira kita negara kepulauan sangat membutuhkan ini untuk kemudian bisa dan ini sebuah kebanggaan juga tentu saja yang menghubungkan pulau-pulau yang kemudian hari ini belum ya terlalu bisa kita jangkau secara lebih lebih cepat, meskipun sarananya sudah ada bandara-bandara itu, tapi kan hanya misalnya kalau Sumatera Utara itu pusatnya Medan, Kualanamu ya ada *sih* ke Pinangsori yang di Tapteng sana begitu, itu jenis pesawatnya apa namanya itu yang baling-baling? ATR, ATR, ATR.

Di Dapil kami misalnya ada di Mandailing Natal sedang bangun kalau pendek kalau jenis pesawat ini saya yakin bisa. Kalau N219 *enggak* bisa mendarat, apalagi Pak yang bisa mendarat begitu? Iya kan. Aek Godang juga ada di Padang Lawas Utara yang hari ini *enggak* termanfaatkan juga begitu ya.

Saya kira saya *enggak* tahu seingat saya *sih* bahkan PT DI itu sudah produksi untuk luar dulu penjelasannya begitu. Nah, kita tentu, nah pada waktu itu memang kita yang dorong juga karena kita bermitra dengan Ristek ya, cobalah diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri begitu Pak Menteri.

Pimpinan, saya kira demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Gus Irawan.

Dari Nasdem kayaknya *enggak* ada kelihatan ya?

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Konsolidasi.

KETUA RAPAT:

Lagi konsolidasi Nasdem.

Kalau begitu PKB.

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Konsolidasi.

KETUA RAPAT:

Konsolidasi juga. *Wah*, bagus ini kalau banyak yang konsolidasi. Silakan Demokrat.

F – PD (Hj. SITI MUFATTAHAH, Psi., M.B.A.):

Untuk Siti?

KETUA RAPAT:

Ya Ibu Siti katanya. Perintah Kapoksi itu.

F – PD (Hj. SITI MUFATTAHAH, Psi., M.B.A.):

Siap Kapoksi.

Terima kasih, *haturnuhun*.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Hari ini *Alhamdulillah* kita berhasil akhirnya rapat dengan Bappenas. Terima kasih Pak Menteri hadir hari ini. Terima kasih, kemarin kan sempat tertunda. Sekarang sudah riil Pak Menteri hadir di sini.

Pak Menteri, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama yaitu mengenai capaian *output* 2023 ya, kira-kira sejauh apa anggaran yang sudah direalisasikan terkait dengan implementasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon? Bagaimana implementasinya? Ini

kami perlu jelas karena kami bisa agar kami bisa mengevaluasi seperti apa capaian *output* dari Bappenas untuk masalah implementasi ekonomi hijau ini. Apakah setiap K/L juga berkomitmen untuk melakukan program ini secara *sustainable*? Ini penting ya.

Kemudian yang kedua, sama dengan rekan yang lain seperti Pak Agung juga menyinggung tentang Krisna-Sakti. Kita perlu ingat bahwa beberapa waktu yang lalu sempat marak bahwa aplikasi K/L termasuk dalam pemborosan anggaran. Sejauh apa kira-kira integrasi aplikasi Krisna-Sakti ini dapat mengefisiensi anggaran K/L?

Kemudian yang berikutnya, dalam Pagu Indikatif yang diusulkan terdapat program dalam belanja barang yaitu sistem perencanaan pendanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran, apakah ini sudah dalam ada dalam tahun penganggaran sebelumnya dan bagaimana program ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di tahun depan tahun 2024?

Kemudian yang berikutnya kami juga ingin menanyakan terkait rencana kerja di tahun 2024, yaitu koordinasi pelaksanaan *food estate*, beberapa waktu yang lalu kita sempat tahu bahwa ada berita mengenai ketidakefektifan dari pelaksanaan program ini *food estate* ini, apakah atau bagaimana pandangan Bappenas mengenai hal ini? Bagaimana kira-kira tinjauannya sehingga program ini tetap dilakukan di tahun depan tahun 2024 karena ada ada anggarannya di tahun 2024?

Kemudian yang berikutnya, Bappenas juga akan melaksanakan inisiasi penguatan sistem kedirgantaraan Indonesia tadi juga sudah sempat disinggung. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana hal ini nantinya dapat memiliki dampak terhadap perekonomian, akses, serta logistik masyarakat. Ini penting ya karena percuma kalau tidak bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kemudian yang berikutnya, di tahun 2022 saya mengingatkan kembali di tahun 2022, Bappenas mendapatkan *awards* luar biasa saya apresiasi dalam "Keterbukaan Informasi Publik". Seperti yang kita ketahui transparansi dan akuntabilitas amat penting bagi masyarakat. Nah, bagaimana strategi Bappenas di tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik ini dengan anggaran yang diusulkan? Seperti apa kira-kira terobosannya? Saya butuh terobosan yang kreatif dan spektakuler, sehingga capaian target untuk keterbukaan informasi ini informasi publik ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Kemudian yang berikutnya, kira-kira bagaimana Bappenas sendiri melakukan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas belanja dalam APBN-nya? Dan mungkin berikutnya lagi ada juga pertanyaan kami, saya lihat di paparan ini terdapat program-program yang dibiayai oleh luar negeri, serta pinjaman luar negeri ya. Khusus yang program yang dibiayai oleh luar negeri dan pinjaman dari luar negeri memang di sini *output*-nya sudah tertulis masih 3 sampai 4 tahun lagi ya.

Namun, kami ingin tahu sejauh apa progresnya di tahun 2023 ini? Mungkin bisa dijelaskan berapa persen progres realisasinya dan seperti apa ke depannya begitu, sehingga apakah ada kendala atau hambatan dalam merealisasikan programnya.

Kemudian yang terakhir, untuk BMN. Saya ingin tahu Pak, BMN apa saja yang Bappenas saat ini kelola?

Mungkin itu saja Pimpinan yang kami ingin sampaikan. Terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullaahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh,

Terima kasih Ibu Siti.

Dari Fraksi PKS, Ustad Hidayatullah silakan.

F – PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Pimpinan Komisi dan Rekan-rekan Komisi XI,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Pertama, saya ingin mendapat penjelasan yang rinci tertulis saja Pak Menteri terkait kegiatan baru itu supaya kitanya paham terkait inisiasi penguatan ekosistem yang 200-an miliar itu dengan persiapan penyelenggara World Osaka itu, nanti tertulis saja. Ada 500-an miliar karena program baru ini 700-an miliar ini sepertiga dari total anggarannya Bappenas.

Yang kedua, terkait pinjaman. Ini ada pinjaman 41 miliar, seberapa penting ini? Anggaran kita besar kok ada minjam 41 miliar, untuk apa ini? Kemarin Pak Masinton soal pinjaman ini pinjaman *mangrove* ya? Untuk apa itu? Seberapa penting? Karena kan anggaran kita triliunan, kenapa kok bisa ada minjam 41 miliar? Apa tidak bisa dipakai anggaran yang ada saja, tidak harus minjam? Minjam itu kan pemahaman kita terpaksa, *enggak* ada lagi jalan kita minjam. Apakah ini betul-betul sudah dalam kondisi terpaksa lalu harus meminjam?

Yang terakhir ini terkait dengan NTP tadi, apa faktor-faktor yang kenapa *ndak* bisa terus meningkat? Faktor-faktor apa saja yang di luar kontrolnya Bappenas, pemerintah, sehingga kita tidak bisa merencanakan NTP yang lebih baik kepada petani dan nelayan? Kemudian misalnya dikaitkan dengan kita sudah bangun infrastruktur luar biasa besar, tol dan lain-lain, ini *gimana* hubungannya dengan NTP ini? Untuk siapa itu dibangun

infrastruktur yang luar biasa besar itu? Nah, itu kira-kira penjelasan yang ingin kami mintakan tambahan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan rekan-rekan terdahulu.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh.

Dari PAN? *Enggak ada.*

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Konsolidasi.

KETUA RAPAT:

Konsolidasi juga. Ini kalau sudah, ini kayaknya 2024 sudah jadi ini, konsolidasi.

Dari PPP ada? Konsolidasi juga?

F – PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

PPP sudah selesai konsolidasinya.

KETUA RAPAT:

Oh sudah selesai.

Silakan Bu Wartiah.

F – PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Tercepat, tercepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi XI beserta Rekan-rekan Komisi XI, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran.

Saya langsung saja ke halaman 21, bahwa pagu indikatif untuk PPN/Bappenas 2024 Rp2.102.745.225.000,00 yang terdiri dari program perencanaan pembangunan nasional dan program dukungan manajemen. Kami berterima kasih bahwa apa yang diminta oleh Pimpinan Rapat kemarin sudah dijabarkan di apa namanya, maka susunan program hari ini yaitu program perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari sembilan

deputi, kemudian ada staf ahli, Sesmen, Sestama dan program dukungan manajemen secara rinci tentu ini memperjelas apa yang kami minta sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, terima kasih sekali lagi.

Namun demikian, ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan dan mungkin pertajam. Mulai dari halaman 34 yaitu kegiatan prioritas Deputi bidang Politik Hukum dan Pertahanan, kami hanya menyorot di sini yang berhubungan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ini kami mohon maksudnya apa? Yang kita ketahui kemarin kan sudah selesai itu Undang-Undang Pemilu, tetap terbuka yang sebelumnya menjadi menjadi hal-hal yang membuat Caleg-caleg di atas nomor urut 1 galau, tetapi sekarang sudah tidak ada itu, semua *happy* ya semua *happy*, termasuk sebenarnya orang-orang PDI juga *happy* semua. Kemudian karena PDI kan minta tertutup, nah tetapi terbuka, tetapi sekarang semua *happy* semua.

Kemudian yang kedua, saya menyoroti di halaman 35 Pak Menteri ya, kegiatan prioritas Deputi bidang Sarana Prasarana yaitu yang berhubungan dengan koordinasi penanganan pemukiman kumuh dan terpadu. Saya berharap ini untuk terus perlu ditingkatkan dan dipastikan bahwa ini untuk semua adil untuk semua ya untuk ke depan penanganan pemukiman kumuh itu bagi daerah Jawa dan luar Jawa adil dan merata, karena saya kan dari luar Jawa tentu ini suarakan.

Kemudian halaman selanjutnya 37 yang berhubungan dengan kegiatan prioritas Deputi bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, saya termasuk juga sangat mengapresiasi bahwa di dalamnya ditaruh pengelolaan manajemen risiko pembangunan nasional. Ini luar biasa langkah antisipasi untuk ke depan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian selanjutnya, Nah, ini saya jadi pertanyaan yang halaman 38, kegiatan prioritas sekretaris atau Sestama yang berhubungan dengan indikator sasaran program. Saya melihat ini salah satunya adalah perencanaan yang memenuhi standar kompetensi itu ditaruh 90%, kemudian rekomendasi hasil analisis kebijakan atas penyelesaian isu strategis dan seterusnya itu 97%, kemudian rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan jabatan fungsional 95%, dan indeks kepuasan pengguna layanan 95%. Pertanyaan kami adalah apa filosofinya *kok* di perencanaan yang memenuhi standar itu hanya 90% yang lain-lain itu di atas 95 dan minimal 95%? Ini perlu kami pertanyakan kan sesuatu sukses itu kan diawali dengan perencanaan yang baik, tepat sasaran dan juga pengawalannya dengan baik.

Dan kami berharap secara keseluruhan bahwa dari Bappenas juga dalam apa namanya memperhatikan ke depannya untuk mempercepat dan memaksimalkan serapan anggaran di kementerian dan lembaga dan terakhir mungkin belum ada yang menyinggung tentang usulan tambahan anggaran, menurut kami tentu ini apa namanya hal yang biasa ya, hal yang biasa karena kegiatan prioritas utama salah satunya adalah pengawalan penyusunan

RPJMN 2025 sampai 2029 dan usulan tambahan 300 miliar, tentu nanti kita akan bicarakan bersama-sama di internal Komisi XI, tapi prinsipnya kami apresiasi dan setuju untuk itu tapi tentu ada kebersamaan nantinya karena ini berkaitan dengan apa namanya yang disampaikan tadi bahwa pengembangan evaluasi kontribusi seterusnya, penguatan pengendalian dan penguatan kapasitas SDM semua ini sudah dijelaskan untuk peruntukannya.

Saya kira ini saja dari kami Bapak Menteri. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi. Demikian dari kami.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh,

Terima kasih Bu Wartiah.

Selanjutnya dari meja Pimpinan, silakan Pak Dolfie.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI,
Yang terhormat Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta Deputi dan jajarannya.

Dari penjelasan Pak Menteri, kita tadi banyak mengetahui Pak bahwa selama ini di tempat Bapak yang punya tugas melakukan penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi, terdapat hal-hal strategis yang sebenarnya menjadi ruang lingkup juga Komisi XI ternyata, misalnya di sini ada tadi di kedeputan bertugas dalam penyusunan makro ekonomi, kemudian ada lagi mengenai kebijakan pengalokasian DAK, kemudian ada lagi kebijakan dana desa, kemudian ada lagi tentang peta jalan transisi energi, di mana di Komisi XI sudah diputuskan di Undang-Undang HPP tentang perdagangan karbon dan pajak karbon. Kemudian ada lagi penguatan pemanfaatan Regsosek yang juga bermitra di Komisi XI BPS-nya, kemudian ada lagi penyusunan RPJMN 2025-2029. Kemudian ada lagi koordinasi pelaksanaan Inpres jalan daerah, selanjutnya ada lagi penyusunan kebijakan penyusunan pagu belanja kementerian lembaga, ada lagi kemudian evaluasi kontribusi kinerja dan belanja kementerian/lembaga dan daerah. Nah, hal-hal ini sebenarnya sangat strategis yang tidak pernah kita ketahui bagaimana implementasinya selama ini. Ini kan reguler *nih* Pak, bukan sesuatu yang baru.

Nah, oleh karena itu, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agun tadi, agar meningkatkan fungsi komunikasi kita ini Pak antara Komisi XI dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan dan menetapkan

kebijakan-kebijakan yang tadi saya sebutkan itu, misalnya di kebijakan DAK Pak. Sesuai dengan Undang-Undang HKPD yang baru, DAK itu diperuntukkan untuk lima hal, yang pertama, mencapai prioritas nasional. Kedua, mempercepat pembangunan daerah. Ketiga, mengurangi kesenjangan layanan publik. Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kelima, mendorong operasional layanan publik.

Kalau kita lihat dari lima peruntukan ini, Bappenas kan cenderung mengunci semua DAK fisik itu dalam rangka mencapai prioritas nasional, sedangkan alokasi untuk mengurangi untuk mempercepat pembangunan daerah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu relatif kecil karena dua ini berbasis pada aspirasi daerah Pak. Kalau tidak bisa dikatakan termasuk aspirasi dari Anggota DPR, ini kecil Pak alokasinya 2% mungkin dari seluruh DAK fisik.

Nah, kebijakan DAK fisik ke depan ini Pak agar diperkuat ini Pak dalam memenuhi pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita lihat DAK fisik dari tahun ke tahun bukan membesar, mengecil. Sudah mengecil direbut untuk memprioritas program nasional. Artinya kan program prioritas nasional sebenarnya sudah ada di K/L-K/L.

Nah, Bapak bilang betul tapi kebijakan DAK disusun Bapak tidak mencerminkan itu Pak, semua dikunci di-*lock free*, *lock free*, sehingga kita tidak aspirasi daerah mental semua Pak, mental. Nah, ini agar ke depan DAK ini Pak, mungkin rapat koordinasinya setelah rapat kerja saja Pak. Agar kebijakan DAK ini dibuat lebih fleksibel dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang HKPD yang saya sebutkan tadi: (1) memperkuat pembangunan daerah; (2) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena kalau prioritas nasional juga diambil dari DAK Pak, ya bagaimana daerah bisa membangun.

Pak Menteri sudah menyampaikan kepada kami rincian program-program kementerian/lembaga yang *landing* di setiap kabupaten. Di tempat saya Pak, tidak ada program kementerian yang *landing*, kecuali yang rutin. Apa itu yang rutin, KIP, KIS, ini apa namanya PKH dari kementerian teknis *enggak* ada. Artinya apa? Kebutuhan terkait DAK dalam rangka untuk pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Nah, kalau Bapak *lock free*-kan itu di program dan kebijakan DAK Bapak, ya mereka aksesnya dari mana lagi daerah? Nah, ini Pak yang kita perlu pertajam ke depan.

Nah, yang kedua Pak, Bapak mungkin hadir juga di dalam rapat dengan presiden yang dihadiri BPKP, Kementerian Keuangan yang ditayangkan secara nasional tentang keluhan presiden bagaimana kualitas belanja daerah yang 10 miliar untuk *stunting* ternyata yang betul-betul sampai ke rakyat hanya 2 miliar. Sebenarnya ini tidak hanya di belanja daerah Pak, belanja pemerintah pusat juga terjadi. Coba kita lihat Pak yang skema belanja pemerintah pusat yang kemarin Bapak mengkonfirmasi bahwa seluruh belanja pemerintah pusat hanya 56% yang terkait dengan capaian-capaian RPJMN. Nah, coba mana tayangkan yang 56%.

Nah, ini Pak, Bapak ini ini saya kutip dari pernyataan Bapak rapat kerja kita yang kemarin itu Pak, bahwa hanya 56% dari program K/L itu yang bisa berkaitan atau mencapai sasaran target RPJMN. Pertanyaannya yang 44% ini untuk kepentingan siapa? Nah, bagaimana Bapak dalam fungsi-fungsi tadi Pak, fungsi perencanaan, pengalokasian dan pengendalian bisa memastikan tidak ada yang 44% ini, yang kemudian muncul program-program inisiatif baru yang sebenarnya tidak punya kaitan dengan RPJMN. Pertanyaan kita 44% ini kan besar Pak, untuk kepentingan siapa kemudian?

Nah, ini kami harapkan Bappenas ke depan ini tahun terakhir Pak, tahap tahun terakhir ini, hal-hal ini bisa dikoreksi Pak, *enggak* bisa dibiarkan. Kita kan harus membenarkan yang membiasakan yang benar Pak, bukan membenarkan yang biasa ini Pak, karena sudah terbiasa ini dijalankan bertahun-tahun terus kita anggap benar, kan tidak Pak. Ini yang kita perlu koreksi ke depan Pak Menteri.

Kemudian saya membaca tadi dari program-program di kementerian Pak Menteri, itu ada 45 kegiatan prioritas. Nah, apakah 45 kegiatan prioritas ini di seluruh kementerian Pak Menteri ini, itu memang dalam rangka tahap terakhir pemerintahan ini atau meletakkan inisiatif-inisiatif baru untuk lima tahun ke depan? Ini perlu dipertajam Pak Menteri, bahwa harus disadari bahwa ini adalah tahun terakhir anggaran tahun terakhir pemerintahan ini, sehingga program-programnya juga harus dipertajam dalam rangka menuntaskan tahap terakhir ini, bukan inisiatif-inisiatif baru yang diletakkan yang kemungkinan bisa berlanjut/bisa tidak berlanjut ke depan. Kan Pak Menteri apa masih lima tahun lagi masih jadi Menteri Bappenas? Itu loh Pak. Jadi agar program-program di Kementerian PPN/Bappenas ini dipertajam Pak untuk benar-benar dalam kerangka memang ini tahapan terakhir pemerintahan itu.

Kemudian mengenai manajemen risiko perencanaan, ini kita agak terkejut juga bahwa selama ini dalam fungsi-fungsi Bappenas mulai dari perencanaan, penetapan perencanaan dan seterusnya, tidak ada menilai tidak punya suatu alat ukur tentang risiko perencanaan. Kalau ini baru disusun Pak Menteri, selesai tahun depan, mau digunakan untuk apa ini? Sementara tahun depan sudah selesai RPJMN 2020-2024, untuk apa Pak Menteri?

Jadi kalau dilihat dari skala prioritasnya bahwa ini penting, penting, tapi kalau kita lihat urgensinya pada tahap terakhir ini kok saya tidak melihat, itu Pak Menteri. Ya ini nilainya 150 miliar lagi, belum lagi yang minta tambahan anggaran yang 100 miliar dalam rangka pencapaian sasaran Indonesia emas, ini kan RPJP. Di DPR juga akan membahas ini, tapi kita *enggak* dapat tambahan anggaran 100 miliar *tuh* Pak untuk membahas RPJP. Artinya kan fungsi-fungsi ini sudah biasa Pak. Saya tidak tidak melihat 100 miliar ini dalam penyusunan RPJP itu menjadi sesuatu yang khusus karena kita membahas Undang-Undang RPJP nanti *enggak* ada tambahan 100 miliar untuk kita membahas itu, *enggak* ada Pak, anggaran kita lihat *flat* saja dalam fungsi-fungsi kita, fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Jadi ini agar

diperhatikan juga Pak Menteri untuk mempertajam usulan-usulan ini lebih pada kepentingan untuk menyelesaikan tahapan 2020-2024.

Kemudian di raker yang sebelumnya Pak Menteri ada menyampaikan bahwa ada pinjaman-pinjaman luar negeri, kegiatan PHLN 2024 itu ada yang baru-baru. Kalau yang lama ya sudah terlanjur kita tidak bisa membahas Pak. Nah, untuk yang baru-baru ini Pak, seperti misalnya *National Urban Flood Resilience Project*, kemudian ada *Flood Management and Coastal Protection in North Java*. Nah, ini kapan dibahas nantinya mekanismenya kapan dibahas? Apakah di kementerian teknis atau di mana? Karena kemarin kami dari dari Kementerian Keuangan agak terkejut-terkejut itu Pak, ketika Pak Suminto Dirjen apa Pinjaman Pembiayaan dan Risiko menyampaikan apa saja *sih* pinjaman-pinjaman luar negeri itu yang ada di kementerian lembaga. Itu judulnya memang antara penting dan tidak itu kita melihat itu *enggak* penting, tapi kenapa kita mengkaitkan diri kepada program-program pinjaman luar negeri melalui kegiatan yang setahu saya selalu ada syarat dan ketentuan agar pinjaman itu bisa efektif. Nah, syarat dan ketentuan itu ya bisa iya bisa tidak dalam arti untuk kepentingan nasional kita. Misalnya konsultannya bisa dari mereka, eksekutor dari kegiatan itu dari mereka, terus kita dapat apanya sebenarnya?

Nah, ini yang perlu ke depan untuk yang baru-baru ini Pak, ini tadi sudah diinformasikan cuma kami ingin tahu mekanisme persetujuannya di mana? Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar “Kerja sama internasional yang membebani keuangan negara harus persetujuan DPR”, kecuali pinjaman ini Bapak nilai tidak membebani keuangan negara.

Pembahasan di kementerian lembaga tidak pernah Pak pembiayaan itu per program disampaikan bahwa ini pinjaman *enggak*, bahwa ada komponen pinjaman luar negeri itu dipersepsikan dalam satu *basket* dari pembiayaan. Nah, jangan sampai pemerintah dalam mekanisme yang bias yang kabur seperti ini, pinjaman luar negeri ini kemudian disahkan tanpa sebenarnya mengetahui atensi yang sebenarnya. Itu loh Pak Menteri. Nah, ini Pak Menteri sudah menyampaikan kepada kita setidaknya-tidaknya 2024 ada lima program yang nanti akan menggunakan pinjaman utang luar negeri, yang kami belum tahu ini nanti ada di kementerian mana pembahasannya dan mekanisme persetujuannya itu melalui mekanisme apa, karena kalau di Banggar sendiri pembiayaan itu dalam satu *basket*.

Kemudian yang lain, termasuk di tempat Kementerian PPN/Bappenas tadi disebutkan pinjaman utang luar negerinya ada komponennya 41,6 miliar. Ini apakah pinjaman yang baru mau dilakukan pada tahun 2024 atau ini adalah penarikan dari pinjaman-pinjaman sebelumnya? Nah, ini kita belum dapat informasi Pak Menteri. Kalau misalnya ini baru, tentu kita ingin tahu lebih detail nantinya ini pinjaman mengenai apa, dari mana, untuk kepentingan apa, itu Pak Menteri.

Sementara dari saya itu Pak Menteri. Jadi intinya adalah.

KETUA RAPAT:

Sementara atau sudah ini?

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Nanti kan ada penjelasan kita akan perdalam lagi kalau penjelasan Pak Menteri masih perlu kita dalam. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih.

Pak Dolfie dan Teman-teman Anggota Komisi XI yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Saya kira tadi ada 6-7 ya teman-teman dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang memberikan tanggapan dan pendalaman. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk dijawab dan untuk teman-teman sekalian, saya kira terkait dengan Tupoksi dan kegiatan-kegiatan prioritas yang ada di Eselon I yang mungkin kita anggap penting mungkin nanti kita adakan RDP saja begitu.

Silakan Pak Menteri, saya persilakan.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Baik.

Terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya. Pertama Pak Andreas, memang RUU RPJPN itu semula itu dijadwalkan diselesaikan tahun depan 2024, tapi kemudian kami dapat direktif dari presiden untuk diselesaikan pada September 2023, iya. Nah, karena itu memang harus ada perubahan di prioritas dan sudah dibahas sudah disampaikan oleh Kementerian Kumham ke Baleg. Di jangka menengahnya sudah masuk Bapak, tapi itunya ya sehingga kami menyiapkannya dengan cepat atas permintaan itu. Itu yang yang pertama.

Kemudian terkait dengan indeks yang kami pakai di sini Bapak, ini adalah indeks yang internal untuk di Bappenas. Jadi bukan untuk indeks yang punya akibat ke luar Bapak. Kalau indeks yang ke luar misalnya ya terkait dengan kemiskinan dan seterusnya tentu sifatnya berbeda, itu masuk di dalam indeks kesejahteraan. Sebagaimana kami juga mengutip apa yang kami turunkan dari ...(suara tidak jelas) mengenai ini. Nanti kami jelaskan lebih detail ke Pak Andreas soal ini.

Kemudian untuk Pak Agun mengenai integrasi Krisna-Sakti dan kebijakan dan proses prosedur DAK. Ya saya hormati sekali Bapak mengenai ini dan ini terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dolfie

mengenai alokasi yang 2% itu. Sebenarnya di kami itu lebih banyak di kebijakannya Bapak. Jadi kami itu hanya di kebijakannya, tapi alokasinya, numeriknya, nominalnya itu tidak ada di kami, tidak di Bappenas, itu masalahnya.

Nah, kami tadi misalnya kami berinisiasi untuk melakukan rapat sebelum ke sini, rapat tingkat menteri mengenai dana desa Bapak, karena itu permintaan dari Banggar dipimpin oleh Bappenas dan kami kemudian menjelaskan dan meminta kepada K/L-K/L sebagaimana yang diminta oleh DPR terkait dengan dana desa itu. Berapa besar *sih* persentasi yang pantas di *earmark* dan di *non-earmark* dan saya mengatakan itu seharusnya tidak perlu disamaratakan karena ada daerah yang memang perlu di-*earmark*, ada yang tidak perlu di-*earmark*, disesuaikan dengan keadaannya, kondisinya dan target-target nasional, satu.

Yang kedua, kami juga sampaikan misalnya desa juga jangan terlalu dibebani programnya begitu punya banyak 10 sampai 12 program itu mereka merasakan apa dan apa yang dilakukan, karena tadi itu kemudian kami arahkan kalau bisa 3-4 mungkin maksimum 5 program sudah cukup, jauh lebih cukup. Tapi kalau sudah sampai program tadi kami dengarkan dari salah satu kementerian itu juga Kementerian Desa itu punya banyak, saya bilang desa mau *ngapain* kalau sudah kayak begitu ya? Akibatnya program seperti *stunting* dan seterusnya.

Dan kalau ada daerah yang tidak perlu TB, kenapa harus dipaksa TB? Oh ini KL yang lain Pak yang minta. Ya jangan, begitu. Kalau di sana memang tidak ada TB. Kami ceritakan mengenai TB misalnya paling banyak di pulau Jawa dan sebagian sedikit di Timur dan di Pulau Jawa paling banyak di Jawa Barat dan di Jawa barat paling banyak itu di kota Bandung dan di kota Bandung yang paling banyak di Kecamatan Balubur, nah begitu. Jadi ada Bandung yang lain yang masih bersih dan seterusnya. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi *enggak* bisa di *gebyah uyah* begitu, *set* begitu saja. Jadi mengenai ini, itu contoh.

Termasuk dalam integrasi Krisna-Sakti, kami menginisiasi dari 2019 Pak Agun. Kami menginisiasi dari 2000, saya pertama kali masuk Bappenas. Kemudian rapat pertama dengan Ibu Menteri Keuangan tahun 2020. Kami kemudian menandatangani itu tahun ini, lalu itu hanya bisa berlaku di tahun 2024. Saya bertanya pada beliau dan di meja itu bersama Menteri Keuangan, ada Dirjen Anggaran dan ada Deputi Pendanaan di kami. Saya tanyakan, "Berapa *entry*-nya, *entry* ini?", "Masih sebelas", terlalu banyak. Saya tanya sama Pak Scenaider, "Berapa perlunya?", "Dua". Bu Menteri tanya sama saya, "Pak Harso berapa?", "Satu".

Jadi *enggak* bikin bingung begitu Pak, karena itu juga kebingungan itu membuat kerepotan. Ini sistem seperti ini kami coba begitu ya, jadi belum juga berjalan Pak untuk menjadi satu itu belum, *entry* itu belum. Berapa *entry* sekarang? Masih tujuh atau sebelas? Kan masih banyak Pak. Jadi kami mengusulkan yang baik tapi belum dikerjakan juga ya di luar kemampuan kami. DAK juga demikian.

F – PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc. IP., M.Si.):

Pak Ketua, saya interupsi sedikit untuk ini boleh?

KETUA RAPAT:

Ya Kang.

F – PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc. IP., M.Si.):

Ya untuk poin ini satu saja Pak, saya mohon di Komisi XI diberikan catatan. Saya usul ada pertemuan tersendiri Pak antara Bappenas, Dirjen Anggaran, Dirjen...

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Deputi Pendanaan.

F – PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc. IP., M.Si.):

HKPD, soal bagaimana sebetulnya prosedur mekanisme hal formilnya, prosesnya, supaya itu ditandatangani kalau perlu kita tahu Pak aturan main itu. Jadi kalau selama ini saya lihat masing-masing lempar bola-lempar bola. Saya sudah enam periode dilempar bola Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Kang.

F – PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc. IP., M.Si.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Insyallah nanti kita jadwalkan. Lanjutkan.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Baik. Jadi sekali lagi kami kan itu diminta untuk bukan menganggarkan, mengalokasi dan bentuknya adalah kebijakan. Jadi apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Jadi itu problem di kami.

Seperti tadi, saya ingin sampaikan maaf dari gambarnya Pak, Pak siapa, Pak. Jadi postur misalnya K/L itu yang ada di kami 1.000,8 triliun, belanja operasional 319,2 triliun. Jadi di gambarnya yang terhormat Pak

Dolfie tadi yang Ketua. Non-operasionalnya 681,6 triliun, prioritasnya itu hanya 412,5. Yang disebut prioritas itu yang masuk di dalam kerangka RKP. Non-prioritasnya 269,0. Kenapa bisa terjadi, ya karena trilateral itu dan kami tidak kuasa untuk lebih dari itu, ini kami sampaikan. Itu saya perbaiki mengenai yang saya sampaikan. Sebenarnya kami usulkan 56%, tapi yang terjadi turun lagi menjadi 40, ya sudahlah.

Kemudian Pak Gus, oh *tak* boleh pakai Pak, Gus, ya mengenai manajemen risiko pembangunan nasional itu penting. Kami mengenalkan GRC memang setelah Covid. Kami bikin prakarsa, Perpresnya baru keluar tahun ini Bapak begitu. Jadi waktu saya di Bappenas, saya bertanya bagaimana mengukur satu proyek misalnya yang *revenue base*, itu tingkat risikonya seperti apa? Kalau di swasta maaf saya bilang kalau di swasta itu ada namanya GRC. Terus bagaimana? Kami kemudian Bappenas itu mengadakan pelatihan sendiri internal kami untuk latihan manajemen risiko GRC sebagaimana yang dikenal luas dan kemudian kami menunggu terus supaya inisiatif itu diterima dan akhirnya diterima oleh presiden, kemudian keluarlah Perpres itu tahun tahun ini, baru ini, baru ini, bulan ini.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Tanggal 16.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Tanggal 16. Jadi diinisiasi sudah cukup lama kami menyusunnya dan kami juga menyiapkan diri karena misalnya *major project* itu banyak sekali *major-major project* yang juga kami ingin dilihat risikonya, misalnya soal-soal tadi, tadi dikatakan bangun apa namanya bendungan, ada irigasi primer tapi tidak nyambung sekunder dan tersiernya, siapa yang harus bertanggung jawab begitu. Kan luar biasa kita bangun dan triliunan begitu, kita buang di sana. Nah, cara mengukurnya bagaimana, kami kan *enggak* bisa langsung nuduh begitu Pak. Jadi kami coba dengan instrumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya apa boleh buat kalau kami baru dapatnya sekarang, tapi kami coba untuk 2024. Ini memang harus ada sistem yang dibangun sedemikian rupa, jadi harus masuk di sana untuk dimonitor. Pertama *governance*-nya benar, risikonya bisa di ya hitung, kemudian dia *comply*. Nah, ini yang apa kita kenalkan di situ. Jadi itu manajemen risiko yang saya ambil, apa yang saya sampaikan.

Mengenai N-219 ini adalah, N-219 yang tahun lalu memang sudah ada sertifikasi yang hanya berlaku di nasional Pak dan kita kejar adalah N-219 Amphibious untuk mendapatkan sertifikasi internasional FAA, sehingga komersialisasinya bisa dilakukan. Tapi kami juga sudah mendorong Kementerian Pertahanan untuk membeli, kemudian ada beberapa swasta dalam negeri juga sudah mulai membeli, beberapa provinsi pemerintah daerah yang juga sudah menyatakan *intend* untuk membeli karena ini sesuai dengan kebutuhannya untuk N219.

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Harganya berapa?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Harganya kalau Amphibious itu 8 juta dolar Bapak. Kalau harga yang non-Amphibious kira-kira sekitar 6,8.

Kami sudah mengatakan kalau bisa diturunkan jauh lebih lebih bagus karena kenapa harga apa *tuh*, karena dia bisa mendarat di darat dan bisa mendarat di laut. Jadi kalau mau mendarat di darat itu dia *anunya* turun keluar, tapi kalau tidak perlu dia langsung di laut. Itu mengenai..

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Mati.

KETUA RAPAT:

Kenapa bisa mati? Ini termasuk air ini Amphibi ini. Coba dicek dari mana matinya ini. Dari samping Pak Erfan atau bisa nyala *enggak* ya? Oh *enggak* ada.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

...(suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Enggak terekam Pak Menteri, *enggak* terekam kalau *anu*. Oh belakang nyala. Di mana sambungan dari depan ke belakang itu? Cepat, cepat. Ini di belakang nyala, jadi yang di belakang ke depan lewat mana? Masa *enggak* bisa dicari *anu*-nya aksesnya dari belakang ke depan lewat mana?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Semua depan mati ya Pak?

KETUA RAPAT:

Waduh, masa harus bubar. *Bagaimana sih?* *Waduh*, masa tidak bisa dapat ini.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Izin Pak, di sini Pak.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Biar cepat.

KETUA RAPAT:

Minta maaf ini Pak Menteri, soalnya teman-teman. *Eenggak* ada yang berani di depannya Pak Menteri kan?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Eenggak juga lah. Biar bisa di-*oprak aprik*.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Izin untuk melanjutkan Pak.

KETUA RAPAT:

Iya lanjut, lanjutkan.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Jadi itu terkait dengan apa namanya mengawal sasaran mulai tahap perencanaan memang itu Pak, jadi kita perlu instrumen seperti itu. Kemudian untuk Ibu Siti dari Fraksi Demokrat mengenai implementasi ekonomi hijau dan rendah karbon. Ya memang beberapa bukan hanya K/L Bu yang apa namanya target dari apa namanya ekonomi hijau dan rendah karbon ini dalam rangka *net zero emission 2060* yang juga direncanakan. Kami juga sedang apa namanya mendiskusikan mengenai istilahnya itu sendiri mengenai *net zero emission* dan *zero emission*. Jadi K/L selain KLHK, ada KKP, ada juga Kementerian ESDM, ada Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Industri ya, bahkan Kementerian Pariwisata, yang juga dalam kaitannya dengan ekonomi hijau dan rendah karbon yang masing-masing dari komitmennya ini nanti bisa kami uraikan secara tertulis saya kira lebih.

Demikian juga dengan *food estate*, posisi kami adalah posisi hanya sampai pada penyusunan *master plan* sesuai dengan direktif presiden dan itu awalnya adalah yang di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Mengenai ekosistem kedirgantaraan, saya kira nanti bisa kami berikan yang lebih lebih lengkap ya, kami punya apa namanya. Kemudian keterbukaan informasi publik saya kira rencana keterbukaannya dan dan seterusnya, transformasi digital, pengadaan barang, saya kira ini sudah dari dulu di Bappenas ini menggunakan e-katalog ya dan kamilah yang

mengedepankan dan memulai soal e-katalog ini dalam pengadaan barang dan jasa.

LKPP itu adalah di bawah supervisi Bappenas dan LKPP itu awalnya kami targetkan untuk bisa menjadi *marketplace* untuk barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN dan kalau sampai dengan e-katalog di daerah itu yang dibelanjakan dibelanjai oleh APBD. Jadi itu juga yang digunakan oleh kami. Mengenai BMN apa saja, nanti saya kira secara tertulis bisa kami sampaikan.

Dari Pak Junaedi dari PKS mengenai nanti kami sampaikan penjelasan soal Expo Osaka. Mengenai pinjaman, tadi juga sudah ada beberapa yang bertanya mengenai PHLN, yang baru ini adalah *National Urban Flood Resilience Project, Flood Management and Coastal Protection in North Java*. Kemudian *Strengthening Apparatus Management and Development*. kemudian itu kalau hibah ada *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA*. Kemudian ISLME ini juga Kementerian KKP.

Kami ini hanya mendapatkan sedikit kalau dilihat angkanya itu kecil semua ya dan ini ada di KL di kementerian yang lain, termasuk *National Urban Flood Resilience Project* itu ada di PUPERA, *Flood Management and Coastal Protection in North Java* itu juga ada di apa namanya di PUPERA dan seterusnya. Jadi kami ada alokasi di situ untuk memonitor, kemudian *review*, mengevaluasi sebagai *counterpart* yang dipakai oleh penyandang dana ya melihat mengenai perkembangan proyek itu. Jadi memang yang sementara yang lain sebagian besar adalah baik yang dimulai dari 2014 dan 2017. *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* itu dimulai tahun lalu, itu juga ada di apa namanya di Kementerian PUPERA.

berikutnya adalah dari Bu Wartiah, terima kasih ya terima kasih Bu mengenai apa namanya perencana karena kami indikatornya disesuaikan dengan perkembangannya. Kami kalau bisa perencananya itu 100 mesti, perencana orangnya.

Kemudian mengenai tambahan anggaran, terima kasih atas apa dukungannya, tapi kami sekali lagi untuk tambahan anggaran ini silakan dipertimbangkan, terutama dalam rangka membangun untuk yang terakhir terkait dengan manajemen risiko.

Tadi juga menanyakan mengenai soal Satu Data Indonesia, kami laporkan di sini bahwa Satu Data Indonesia itu baru 62% dari K/L yang masuk di sana, kemudian begitu juga provinsi masih di sekitar itu, kabupaten/kota dan masih banyak dari kementerian lembaga dan daerah yang tidak memahami benar mengenai soal posisi dari Satu Data Indonesia dalam rangka untuk terbentuknya satu portal data Indonesia ke depan. Sebagaimana saya sampaikan tadi di satu portal itu mestinya nanti akan ada windows: Pertama, window untuk pelayanan *government to citizen*; yang kedua, *government to business* dalam rangka perizinan; *government to government* untuk *interoperability*, kemudian *government to employee* untuk para ASN atau para pekerja di pemerintahan.

Dan kegiatan-kegiatan yang terkait di Komisi XI, ya memang Pak Ketua memang itu saya setuju komunikasi itu diintensifkan antara Bappenas terutama dalam hal kebijakan DAK, saya setuju tadi ada undangan untuk membicarakan ini secara khusus dan terkait dengan *lock free-lock free* itu karena memang ada target-target misalnya gini soal destinasi pariwisata prioritas. Ya memang kalau ada destinasi pariwisata prioritas dengan *automatically* sepuluh itu yang lebih diutamakan, tapi memang kadang kala kami minta kepada K/L yang bersangkutan juga untuk memberikan sebatas yang mereka usulkan sendiri.

Kemudian sekali lagi dalam rangka yang diusulkan melalui DPR ya yang di difasilitasi oleh DPR, *lock free-lock free*-nya ini demikian terbatas, saya kira karena alokasinya juga yang sangat amat terbatas yang diberikan kepada apa melalui Bappenas dan ini juga pembahasan di Badan Anggaran mengenai dana alokasi khusus ini. Saya kira perlu di di apa dibahas lebih detail mengenai dana alokasi khusus itu seperti ini mungkin Pak Dolfie. Pertama, K/L-K/L itu memang harus dengan tegas begitu mengalokasikan menyisihkan anggarannya itu berapa yang dimasukkan ke dalam dana alokasi khusus. Itu harus Pak, karena selama ini juga mereka dan itu untuk apa dan terutama dalam rangka keterkaitan dan dengan prioritas-prioritas nasional yang dilakukan oleh belanja K/L itu sendiri dan memerlukan apa namanya dukungan DAK di daerah. Contoh Pak, yang paling gampang kalau kita membangun jalan nasional. Waktu kita bangun jalan nasional di satu ruas misalnya, saya kasih contoh saja ini jadi contoh saja. Kemudian ada jalan nasional yang sejajar, kemudian membutuhkan jalan yang untuk pendukungnya diantara jalan itu posisinya apakah jalan provinsi atau jalan kabupaten/kota. Nah, kalau jalan kabupaten/kota, maka semestinya ada DAK khusus di daerah itu di ruas jalan itu yang dialokasikan oleh PUPERA misalnya dan kemudian dari peta itu maka PUPERA akan mengalokasikan DAK untuk jalan itu sedemikian rupa. Itulah sebenarnya gagasan kenapa munculnya Inpres karena tidak *nyambung*nya itu.

Nah, sementara DAK yang disediakan itu hampir-hampir ya maaf Pak, itu *enggak*, *enggak* bisa satu DAK itu *enggak* bisa menyelesaikan satu jalan ketika satu ruas jalan itu akan diselesaikan misalnya 3 kilometer hanya bisa 1 kilometer. Tahun depan 1 kilometer, tahun depan lagi 1 kilometer, belum disambung sudah rusak yang 1 kilometer. Itu kami sudah sampaikan juga kami diskusikan.

Jadi yang pertama memang dana alokasi khusus itu semua KL itu harus menyisihkan dengan tegas dulu ketika setelah pagu indikatifnya muncul beberapa DAK-nya yang mau dialokasikan.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Tugas untuk mensinkronisasikan hal ini tugas siapa Pak?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Itu seharusnya di di trilateral Bapak setelah itu ada, antara Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara dan kemudian kami dan KL Pak. Demikian juga misalnya di sektor lain pertanian, perhubungan, karena kalau tidak Pak, kami juga tidak tahu berapa sebenarnya itu. Nanti di ujung baru kami kami tahu oh angkanya cuma sekian DAK-nya. Ya misalnya kalau 165, 165 ya tahun 2024? itu kan banyak sekali dan banyak di disebarkan menjadi tidak efektif.

Kami misalnya Bapak, pernah mengusulkan DAK itu sedemikian rupa, pertama misalnya untuk DAK fisik, itu dipecah Barat Timur supaya gelondongannya itu didapat dirasakan dengan baik. Jadi kalau tahun ini dapat Barat, tahun depan baru Timur dapat, karena jalan-jalan juga misalnya di Jawa kami sudah sampaikan di Jawa sekali lagi di Jawa, ruas Utara dan Selatan itu *nyambung*, tapi antar Utara dan Selatannya itu banyak yang tidak *nyambung* dengan dengan baik.

Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mungkin kalau memang diizinkan kami akan menjawab secara tertulis. Demikian, terima kasih Pimpinan dan para Anggota Komisi XI.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F – PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ya, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Siapa?

Silakan Bang Inton.

F – PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ya, tadi ya setelah mendengarkan paparan Pak Menteri tadi saya semakin bingung, ya pantas saja begitu ya republik ini *enggak* berangkat maju. Bayangan saya tadi bayangan saya Pak ya, Bappenas itu memiliki fungsi strategis dalam melakukan perencanaan pembangunan hingga kemudian kita *enggak* lagi berada dalam situasi kebingungan.

Kalau melihat begini, saya seperti merasa rasanya cara kerja begini Pak ya, baik antar kementerian, saya semakin pesimis saja, mau habis berapa ribu triliun buat republik ini *enggak* akan jadi apa-apa Pak, *enggak* akan jadi apa-apa buat rakyat. Artinya hari ini ya tugas birokrasi pemerintahan kita bukan lagi melayani rakyat tapi hanya melayani dirinya sendiri. Nah, jadi ya tinggal nunggu letupan saja *sih* menurut saya Pak kalau cara kerjanya begini terus ini, bubar ini republik.

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Letupan apa?

F – PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ya kemarahan rakyat, ya bubar habis ribuan triliun bersumber utang apa segala macam membiayai program-program pemerintahan ya, tapi cara kerja birokrasi begini begitu loh Pak. Saya mendengar tadi, lah di mana sebenarnya muara pembangunan perencanaan pembangunannya di mana sebenarnya begitu loh?

Nah kemudian Bapak, terkait tadi pinjaman luar negeri ada berapa yang kemarin dipaparkan dari Kementerian Keuangan itu ada 18 kalau *enggak* salah yang tadi Pak Menteri. Nah, di kan ada proses perencanaan di Bappenas itu kan ada proses perencanaan dan penyiapan pinjaman luar negeri 2020-2024 Pak. Yang tadi maaf Pak, saya mengkonfirmasi ada 18 tadi ya? 18 kegiatan ya yang dari berbagai kementerian/lembaga itu? Pinjaman luar negeri yang bersumber.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Saya tidak ingat Bapak, itu banyak Bapak. Itu mungkin kalau 18 itu mungkin yang kemudian bisa diluncurkan pada tahun 2024, tetapi dalam *blue book*.

F – PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ya yang ada ada *mangrove*-nya itu.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Kalau dalam *blue book* itu cukup banyak Bapak.

F – PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Iya.

Nah, di sini kan ini yang saya ambil yang apa Bappenas Pak ya. Kan ada perencanaan pinjaman luar negeri dilakukan melalui beberapa tahapan yang dituangkan ke dalam empat dokumen perencanaan. Yang saya mau tanyakan, dari berbagai program ya pembiayaan dari pinjaman utang luar negeri maupun hibah, ini masuk *enggak* dalam rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri ini Pak? Usulan-usulan program yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri oleh kementerian/lembaga tadi?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Ya kan begini Pak. Boleh saya jawab langsung?

F – PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ya, silakan Pak.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Kalau pinjaman luar negeri ada proses, pertama pengusulan, kemudian dibahas untuk kemudian diterbitkan *blue book*. Nah, setelah *blue book*, itu K/L-K/L itu harus menyerahkan lagi daftar usulan kegiatannya.

F – PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Iya yang apa ini, kemarin disajikan kemarin itu sudah masuk di situ *enggak*, maksud saya Pak.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Yang disajikan Kementerian Keuangan seharusnya sudah Pak, karena dari situ kemudian muncul *green book*, dari *green book* nanti muncul DKK-nya, lalu kemudian itu...

F – PDI PRJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Oke, oke,

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Kementerian Keuangan

F – PDI PRJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Nah, *oke* Pak silakan.

Terus kemudian ya umpama yang kemarin saya lihat itu ada *mangrove* di wilayah pesisir penanamannya. Seberapa penting *sih* itu Pak? Seberapa penting *sih* itu program itu sehingga harus dibiayai dengan utang luar negeri? Yang saya mau tanyakan seberapa penting itu? Apa kita *enggak* punya anggaran untuk menanam itu, untuk memelihara dan merawat *mangrove* kita, sehingga ya pemeliharaan *mangrove* itu harus dengan utang luar negeri?

Saya *ngaco* ini Pak menurut saya ini, bangsa ini ya, ya termasuk kitanya yang ikut dalam andil merencanakan. Saya *enggak* mau setuju itu, saya *enggak* mau ikut *ngaco* kok. *Mangrove* saja Pak, nah bagaimana itu kajiannya bagaimana begitu loh Pak? Seberapa penting begitu loh? Kan harusnya berbasis kajian dong Pak, kan harusnya berbasis kajian semua karena ini sumber bersumber dari utang luar negeri yang harus kita pertanggungjawabkan pada rakyat. Harusnya kan pinjaman luar negeri itu digunakan yang memang benar-benar satu programnya benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini, benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dan kita tidak punya sumber pembiayaan lain lagi, sehingga kita harus menggunakan pinjaman utang luar negeri.

Kalau pinjaman luar negeri itu hanya memenuhi hasrat kita, ya maaf-maaf *nih* Pak, kita hanya mengejar *fee* dari situ ya maaf-maaf ini, ini yang salah, keliru, kejahatan ini bagi saya, menggunakan ya memanfaatkan pinjaman utang luar negeri yang bukan untuk kepentingan prioritas rakyat kita. Sampai kapan kita membiarkan ini begitu loh Pak? Sampai kapan kita mengelola pemerintahan ya mengelola negara ini dengan cara-cara begini? Kalau itu menjadi sumber prioritas dan menyangkut kebutuhan dasar rakyat, *oke* kita bisa mengerti Pak, tapi kalau itu program yang tidak ada kaitan dengan kepentingan rakyat, hanya untuk menghambur-hamburkan ya uang yang bersumber dari pinjaman utang luar negeri, saya menolak itu Pak. Ke manapun saya tolak itu.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Saya boleh tanya Pak, judulnya Pak, judulnya apa ya?

KETUA RAPAT:

Maksudnya program *mangrove* itu yang mana Pak?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Karena di kami itu *enggak* ada *mangrove* Pak.

F – PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ada kemarin dari manajemen risiko, saya bahannya ada di ruangan lagi.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Kalau hibah ada. Kalau hibah itu *Oceans for Prosperity Project LAUTRA* itu kalau yang di Bappenas ya. Kemudian...

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Pak Menteri, saya bacakan ini judulnya Pak, biar ketemu judulnya ini.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Ya.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Mangrove for Coastal Resilience, World Bank, senilai 146 juta USD, status *on going*. *Mangrove for Coastal Resilience* disingkatnya M4CR. Ini tadi kan ada Deputi apa ini tadi *enggak* tahu juga Deputi Pendanaannya Pak apa tadi pendanaan? World Bank 146 juta USD, status *on going*. Mungkin karena *on going* sudah agak lupa Pak Menterinya dan Deputi.

Di sini disebutkan rencana penarikan pinjaman tunai pagu indikatif tahun 2024. Jadi tahun 2024 akan ditarik. Nah, kita *enggak* tahu ini kapan persetujuannya? Karena pada saat pembahasan itu kami mempertanyakan, kapan kami menyetujui ini? Kok tiba-tiba sudah ada penarikan di 2024. Nah, kalau penjelasan Pak Menteri tadi pastilah ini sudah di *blue book* dan di *green book* karena ini sudah ditarik-tarik Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah siap ditarik itu.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Baik, terima kasih.

Jadi nanti saya coba *trace back* itu, karena ada yang memang World Bank kalau setahu kami adalah LAUTRA, ya laut sejahtera, itu dibiayai oleh World Bank. Kemudian mengenai *Indonesian Sea Large Marine System* ya. Nah, mungkin ini daerah akibat bencana, risiko bencana di apa di daerah itu. Nanti saya kami cari Bapak soal ini, tapi di sini atau itu sudah ada di 2000 sebelumnya.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya interupsi Pak.

Sebenarnya yang mau kita tanyakan itu kapan kita menyetujui? Itu Pak, bukan untuk apa, karena kan proses, kenapa Pak Masinton menanyakan, itu kan ada terjadi, hanya untuk urusan *mangrove* kenapa kita pinjam Bank Dunia.

Nah, kalau kemudian yang kita tanyakan adalah kapan kita menyetujui sehingga sudah ada *on going* yang akan ditarik penarikannya di tahun 2024, sementara kita rapat saja belum pernah membahas masalah tersebut? Itu Pak.

Nah, jadi satunya *on going*, satunya hanya untuk urusan *mangrove* kita harus pinjam Bank Dunia, Bapak sendiri juga bingung itu. Bapak sendiri juga bingung. Jadi kita ini apa ini rapat ini?

KETUA RAPAT:

Eenggak nanti, saya kira begini, untuk terkait dengan apa pendalaman di Eselon I nanti mungkin kita bisa jadwalkan khusus. Jadi RKA K/L-nya dulu.

F – P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Begini Pak Amir, boleh Pak, *ngomong* Pak?

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Fauzi, silakan.

F – P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Yang perlu kemarin Pak Menteri kita diskusi dengan Pak Suminto. Suminto Dirjen, bukan Sumanto. Kalau Sumanto kan pemakan daging, nah ini Suminto, pemakan pemakan PLN.

Kita ingin Pak, satu ya khususnya di Bappenas ini punya perencanaan yang matang tentang PLN (Pinjaman Luar Negeri) dan harus ada persetujuan dari kita Pak. Ini kan persetujuan dari kitanya *kagak*, tiba-tiba bayar utangnya kita. Nah, ini problem Pak maksud saya Pak Menteri.

Nah, kemarin Pak Suminto kita kasih *highlight* bagaimana proses dan prosedur pinjaman luar negeri dan memang di hulunya perencanaannya di Bappenas Pak. Nah, kita ingin proyek-proyek kedirgantaraan, proyek-proyek dirgantara, proyek-proyek yang disampaikan Pak Masinton itu jelas terukur dan terarah Pak maksud kita. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai pengalaman kawan-kawan itu PLN itu judulnya saja, tapi tenaga-tenaga, tenaga yang di dalam berkecimpung itu banyak rata-rata dari luar Pak, kita sebagai objeknya saja. Nah, kita ingin Bappenas punya perencanaan yang matang tentang pinjaman luar negeri. Itu *sih* yang maksud kami tadi Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fauzi.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Baik, nanti kami telusuri yang telah disampaikan tadi, karena begini, biasanya begitu sudah sampai di Kementerian Keuangan itu biasanya sudah keluar PSP-nya dan sudah di apa namanya jadi dari kami itu seringkali kami juga tidak tahu penarikannya seperti apa bentuknya dan K/L yang mana. Kami cuma menyepakati ya program-programnya yang bisa di waktu dibahas mulai dari *blue book*, kemudian prosesnya setelah itu. Nah, *blue book* ini ada yang memang usulan langsung dari kementerian lembaga atas kerja sama internasionalnya atau ada juga usulan dari misalnya World Bank apa negara-negara donor.

Nah, kami kasih contoh Pak, kasih contoh satu ya. Misalnya kami minta kepada Kementerian Keuangan untuk menganggarkan tentang pembaharuan ya dari Dukcapil, karena Dukcapil ya *hardware*-nya itu *hardware* yang lama sekali tahun 2011 dan permintaannya pada waktu itu Dukcapil itu paling satu hari cuma dari 5000 berapa, sekarang itu sudah jutaan perhari transaksi. Yang kami khawatirkan jebol, ya kan begitu.

Untuk menjaga itu, kami menyetujui permintaan Kementerian Dalam Negeri untuk menganggarkan hal itu. Nah, sebelumnya World Bank itu sudah paham soal itu dan mengusulkan untuk membantu Indonesia soal Dukcapil. Kami masih menahan mudah-mudahan ini masih bisa dibiayai oleh rupiah murni, tapi sampai dengan batas yang bisa kita tolelir karena dalam rangka Pemilu 2024, ya kami bilang ya sudahlah biar saja dibiayai oleh World Bank. Kalau melihat angkanya Bapak, harusnya bisa kita biayai berdasarkan apa namanya rupiah murni. Itu contoh Pak, itu kami kasih jadikan contoh. Jadi memang ada situasi-situasi seperti itu. Jadi yang sifatnya *conditionality* yang kita kadang-kadang di luar jangkauan kami.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak, saya interupsi sedikit Pak dengan penjelasannya Pak Menteri tadi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Misbakhun.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak Menteri, berarti dengan penjelasan Bapak tadi, setelah Bapak merumuskan merencanakan sesuatu trilateral, kemudian setelah kementerian lembaga bisa berhubungan langsung dengan Kementerian Keuangan, berarti apa yang tidak direncanakan bisa berjalan di situ dong Pak? Artinya berjalan di situ, lah terus perencanaan fungsinya apa kalau sudah begini? Apa yang dibicarakan direncanakan dalam proses trilateral, kemudian dalam realisasi anggarannya bisa berubah ini.

Berarti ini Pak Ketua, kita ini ada satu kalau begini ini kan ada sesuatu yang luar biasa ini dibicarakan di trilateral kemudian pada saat selesai dianggarkan mereka berhubungan langsung dengan Kementerian Keuangan, mereka bisa mengubah apa yang direncanakan di dalam pembangunan. Kalau begini, ini harus kita kembalikan ke zamannya Bappenas dulu menguasai Direktur Jenderal Anggaran Pak. Mereka *enggak* bisa kalau cuma mengalokasikan, kemudian anggarannya dipegang oleh orang lain, akhirnya antara alokasi dan anggaran tidak sinkron.

Zamannya Pak Widjojo Nitisastro dulu kan Bappenas sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ini kan beriringan antara alokasi dan penganggaran itu. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 itulah tahun LOI-nya IMF itu Undang-Undang Nomor 17 itu maka Direktur Jenderal Anggaran ke Kementerian Keuangan Pak ya sama Perbendaharaan.

KETUA RAPAT:

Itu Pansusnya siapa itu?

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Apa?

KETUA RAPAT:

Pansus undang-undang-nya itu siapa?

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak Harso. Pak Harso sendiri karena beliau melihat bahwa perlu adanya pemisahan antara alokasi dan penganggaran. Sekarang menjadi problem Pak serius Pak, ternyata alokasi mengalokasikan tidak disertai dengan menganggarkan itu problem. Nah, Bapak bertanggung jawab sekarang dengan apa yang Bapak lakukan. Itu kan karena Undang-Undang 17 dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, itu.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Saya dapat informasi bahwa *mangrove* adalah pinjaman tunai *fully domainnya* Kementerian Keuangan. Pinjaman ini tidak masuk *blue book*, jadi karena itu kami tidak tahu.

Terima kasih.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Jelas ini Pak, *blue book* sama *green book*-nya itu jalannya ke sini apa ke sini ini Pak? *Sign* kiri belok kanan ini.

KETUA RAPAT:

Enggak dari blue book sudah enggak masuk.

KETUA RAPAT:

Wah, ini tidak ada ini. Bukan cuma di green book-nya, dari blue book sudah enggak masuk.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Ini yang di blue book saja sudah enggak ada, wah hebat ini, nyelonong ini republik.

KETUA RAPAT:

Ya sudah. Ya saya kira jelas ya.

Masih ada Pak Menteri yang mau disampaikan?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Dan seperti Pak Masinton, sikap kami sama. Ini pernah diusulkan dulu dan ditolak oleh Bappenas untuk masuk di blue book. Kemudian ada, ada another road ya, kami yang tidak mampu untuk itu.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Ada buku lain ternyata.

KETUA RAPAT:

Nanti kita bicarakan dengan anu, Kementerian Keuangan kalau itu. Masih ada Pak Menteri silakan?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Saya kira cukup dan sekali lagi terima kasih atas diskusi yang ini dan membuka apa banyak hal ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa mencukupi dan tentu akan kami susul dengan jawaban-jawaban tertulis yang lebih detail, ya mudah-mudahan bisa melengkapi penjelasan kami hari ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri.

Teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi XI,

Saya kira tadi setelah melakukan pendalaman, kemudian Pak Menteri sudah memberikan tanggapan dan jawaban, sekarang kita coba tampilkan rancangan kesimpulan hasil Raker kita hari ini. Silakan. Saya akan bacakan, silakan Teman-teman kalau ada yang mau dikoreksi langsung dikoreksi saja. Ya Pak Uci.

Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Satu, Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024.

Pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.102.745.225.000,00 dengan rincian program dan fungsi sebagai berikut:

No.	Nama Program	Pagu Indikatif
1.	Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp1.487.908.735.000,00
2.	Dukungan Manajemen	Rp614.836.490.000,00
	Total	Rp2.102.745.225.000,00

Berdasarkan fungsi, Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas fungsinya adalah fungsi pelayanan umum, di sini nilainya sama.

Kemudian poin tiga, Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp300.000.000.000,00 dan diarahkan untuk kegiatan usulan tambahan sebagai berikut:

- a. pengembangan evaluasi kontribusi kementerian lembaga terhadap kinerja pembangunan nasional, *review* belanja K/L, kualitas *output* dan kualitas belanja; kemudian
- b. penguatan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan rencana meliputi: penajaman risiko perencanaan, penguatan pengendalian perencanaan wilayah;
- c. penguatan kapasitas SDM perencana dalam mengawal pencapaian sasaran Indonesia emas.
- d. Komisi XI DPR RI merekomendasikan agar Menteri PPN/Kepala Bappenas mempertajam usulan program terkait dengan menuntaskan RPJM 2020-2024.

Empat, Menteri PPN/Kepala Bappenas meningkatkan kualitas belanja negara yang ditunjukkan dengan implementasi anggaran berbasis kesejahteraan di seluruh kementerian lembaga dan menetapkan lokus kelompok penerima manfaat dari RKA sejumlah seluruh kementerian lembaga pada APBN Tahun Anggaran 2024.

Banyak ini.

Lima, Kementerian PPN/Bappenas melaporkan kepada Komisi XI DPR RI tentang pelaksanaan kebijakan DAK, kebijakan dana desa, peta jalan transisi energi, transformasi ekonomi, penguatan dan pemanfaatan Regsosek, penyiapan RPJMN 2025-2029, pelaksanaan Inpres jalan daerah, kebijakan penyusunan pagu belanja K/L yang berkualitas, serta evaluasi kontribusi kinerja dan belanja K/L dan daerah, serta pinjaman luar negeri.

Enam, Kementerian PPN/Bappenas akan meningkatkan sosialisasi dan komunikasi hal-hal pada poin 5 dengan Komisi XI DPR RI dalam menjalankan fungsi pengalokasian dan fungsi pengendalian Kementerian PPN/Bappenas.

Banyak ini, capek juga bacanya.

Tujuh, Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan DAK Fisik, memperkuat alokasi dan mempercepat pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Delapan, kebijakan pada poin 5 (lima) dan 7 (tujuh) disampaikan pada saat Nota Keuangan RAPBN 2024.

Kementerian PPN/Bappenas mempertajam kerja penyusunan Pagu Belanja K/L Tahun Anggaran 2024 sehingga belanja K/L diarahkan untuk mencapai target capaian prioritas nasional dan proyek prioritas strategis dalam memenuhi RPJMN 2020-2024.

Kalau ada yang mau dikoreksi, langsung dikoreksi saja.

Sepuluh, Kementerian PPN/Bappenas mempertajam kegiatan-kegiatan prioritasnya yang diarahkan dalam menuntaskan program-program pemerintah pada tahun 2024 sebagai tahapan terakhir dari RPJMN 2020-2024 dan evaluasi program-program K/L dalam pencapaian RPJMN 2024.

Sebelas, Komisi XI DPR RI akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementerian PPN/Bappenas.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Ini Pak Amir, saya berharap karena tadi kan minta sinkronisasi dengan kementerian yang terkait, Kementerian Keuangan terkait Pak. Jadi sama-sama unit Eselon I.

KETUA RAPAT:

Ya.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Sinkronkan saja.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ini karena kita Bappenas, jadi yang kita putuskan Bappenas saja. Nanti di undangan baru kita undang dengan kementerian terkait.

Dua belas, Menteri PPN/Kepala Bappenas akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lambat tujuh hari kerja.

Saya kira itu rancangan, silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Pak Menteri ada yang mau dikoreksi?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Enggak ada.

F – P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Saya Pak.

Saya kalau pagu indikatif ini setujulah penambahannya, tidak ada koreksi tapi saya mau menekankan Pak Menteri tentang perencanaan pinjaman luar negeri. Mungkin masuk di poin ke sebelas atau sebelum penutupan tadi Pak. Saya ingin perencanaan luar negeri ini, pinjaman luar negeri ini.

KETUA RAPAT:

Poin lima ada, coba poin lima coba dibuka Pak Fauzi.

F – P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Mana, mana?

KETUA RAPAT:

Jadi Kementerian PPN melaporkan termasuk pinjaman luar negeri.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

PLN itu PLN.

KETUA RAPAT:

Baru datang ya Pak? Kenapa pakai kaca mata?

F – P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Enggak, maksud saya tidak hanya kalau melaporkan setuju saja Pak, tapi kan tugas Pak Menteri ini kan merencanakan, kebijakan begitu loh, tapi kalau melaporkan ya lapor saja pakai WA juga bisa melapor Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini yang *dianu* kebijakan Pak coba dibaca.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Ada Nomor enam juga itu Pak.

KETUA RAPAT:

Enggak, enggak. Kementerian PPN melaporkan kepada Komisi XI tentang pelaksanaan kebijakan.

F – P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Kebijakan DAK.

KETUA RAPAT:

Ya semua ini menjadi kebijakan DAK, dana desa, peta jalan. Poin 6 juga *nyambung* itu Pak.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Berarti Pak Fauzi *kepengennya* itu kebijakan.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Ya sudah kebijakan.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu kebijakan DAK, terus dana desa, peta jalan supaya jangan terlalu banyak kebijakan, capek nanti *ngetiknya*. Diambil saja, hapus saja itu kebijakan dana desa, satu saja kebijakan ya. *Enggak* itu sudah ada kebijakan DAK.

F – P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Ya pelaksanaan kebijakan DAK.

KETUA RAPAT:

Oh ya, ya, boleh, boleh, ya.

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Kebijakan, nah DAK-nya diambil.

KETUA RAPAT:

Dana desa juga diambil.

F – PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Saya mau nanya saja *nih*, apakah mau cukup, cukup melaporkan kebijakan atau kita ingin tahu kebijakannya sebelum dilaksanakan?

KETUA RAPAT:

Saya kira *anu* kita jaga juga jangan juga kita jadi Menteri Bappenas. Ya, saya kira cukup ya?

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Cukup.

KETUA RAPAT:

Oke. Bagaimana Teman-teman sudah? Pak Menteri ada yang dikoreksi?

Baiklah rancangan kesimpulan kita sepakati menjadi kesimpulan.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya kira sebelum kita menutup rapat kerja hari ini, saya berikan kesempatan ke Pak Menteri untuk menyampaikan kata-kata penutup. Silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Baik, terima kasih.

Sebelum ditutup, memang kami juga sedang menyusun untuk menanggapi Pak Misbakhun mengenai terkait dengan Undang-Undang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai sebagai pelaku sejarah, saya ingin memberikan sedikit *background* bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia untuk pertama kali diterbitkan sebagai undang-undang itu adalah APBN Tahun 2004. Itu karena sudah ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelumnya memang itu hanya dalam bentuk Keppres, meskipun ada pembahasannya di DPR.

Kemudian kalau masih ingat dan juga sebagai pelaku sejarah saya kira juga bersama Pak Agun pada waktu itu, cuma Pak Agun begitu ya, mengenai dalam ketika kita membahas mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, saya *enggak* tahu Pak Agun waktu itu ya di kelompok yang mana, yaitu terkait dengan kita tahu bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu ditetapkan sebagai undang-undang diusulkan oleh presiden dan ditetapkan oleh DPR, itu konstitusional Undang-Undang Dasar. Artinya dia diproses seperti pembentukan undang-undang, tapi kemudian ada di Pasal 23 saya lupa Pasal 23D atau 23E. Ada lagi satu norma ini masukan di dalam Undang-Undang Dasar pada waktu itu hal-hal mengenai keuangan negara diatur dalam undang-undang, diatur dengan undang-undang. Lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar ini perdebatannya sengit pada waktu itu, Pasal 4 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, kekuasaan pemerintahan negara itu dijalankan oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan di sana Presiden itu ya menyerahkan kekuasaan fiskal itu kepada Menteri Keuangan, melimpahkan. Kemudian ada dua pipa di situ yang bentuknya menyerahkan dan yang kedua adalah menguasai atau menguasai dan menyerahkan. Pipa ke daerah menyerahkan, pipa ke kementerian lembaga disebut menguasai, maka ada kuasa anggaran.

Ketika itu presidennya adalah Ibu Megawati. Kami rapat, wakil presidennya adalah Pak Hamzah Haz. Saya sebagai salah satu di sana, ada Pak Bambang Kesowo ada tim ekonomi kita juga di sana dan seterusnya. Ibu tidak mau tanda tangan setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan. Meskipun Pak Bambang Kesowo kemudian mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 30 hari setelah ini dia menjadi undang-undang. Itu sejarahnya. Lalu muncullah sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kita memang ingin membuat kabinet presidensial yang kuat, sangat kuat presidensial. Ada pemikiran pada waktu itu Bappenas itu dibuat seperti memang hilang dan kemudian masuk dalam organisasi presiden seperti *Office of Management and Budget* di Amerika Serikat dan kemudian nanti Kementerian Keuangan lah yang cari yang buat. Jadi Kementerian Keuangan pada waktu itu mestinya Kementerian Keuangan itu berkuasa atas dua hal, pertama mencetak uang dan menerbitkan surat utang. Itu latar belakang saja.

Ini panjang sekali kalau kita mau bicara sistem perencanaan pembangunan nasional. Kalau mau seperti apa yang yang baik, presidensial yang kuat dan seterusnya dan supaya *check and balance*-nya itu jalan.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

Dengan ucapan *alhamdulillahirabbil'amin.*

F – PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak, saya tambahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pak
Perbendaharaan Negara.

KETUA RAPAT:

Atas nama Pimpinan, Teman-teman Anggota Komisi XI menyampaikan
permohonan maaf apabila dalam rapat kerja ini ada hal-hal yang kurang
berkenan dan dengan ucapan *alhamdulillahirabbil'amin* rapat kerja saya
nyatakan ditutup.

Sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB)

Jakarta, 19 Juni 2023

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.
NIP. 197106131998032003